



LAPORAN KEUANGAN

**TAHUN ANGGARAN 2025
(UNAUDITED)**



KPKNL KISARAN

Jl. Prof. H.M Yamin No. 47, Kisaran, Kab. Asahan

Telp : 0623-41660 • Faks: 0623-42520

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kisaran adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bontang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis kas dan akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kisaran. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kisaran, 12 Februari 2026
Plh. Kepala Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang Kisaran



Ditandatangani secara elektronik
Tiara Cindhe Valerica



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	iv
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN	1
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	3
II. NERACA	4
III. LAPORAN OPERASIONAL	5
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	6
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	7
A. PENJELASAN UMUM	7
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	27
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	27
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	42
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	47
F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA	49
VI. LAMPIRAN	43
A. Laporan Realisasi Anggaran Komparatif dari MONSAKTI	44
B. Neraca Komparatif dari MONSAKTI	45
C. Laporan Operasional Komparatif dari MONSAKTI	46
D. Laporan Perubahan Ekuitas Komparatif dari MONSAKTI	47
E. Neraca Percobaan Akrua Saldo Awal dari MONSAKTI	48
F. Neraca Percobaan Akrua dari MONSAKTI	49
G. Neraca Percobaan Kas dari MONSAKTI	50
H. Laporan Realisasi Pendapatan per Akun dari MONSAKTI	51
I. Laporan Realisasi Belanja per Akun dari MONSAKTI	52
J. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara	53
K. Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca dari MONSAKTI	54
L. Laporan Barang Intra Komptabel dari MONSAKTI	55
M. Laporan Barang Ekstra Komptabel dari MONSAKTI	56
N. Laporan Persediaan dari MONSAKTI	57
O. Surat Hasil Rekonsiliasi dari MONSAKTI	58
P. Kertas Kerja Telaah	59
Q. Memo Penyesuaian	62
R. Informasi Kinerja Satuan Kerja	63

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kisaran yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kisaran, 12 Februari 2026
Plh. Kepala Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang Kisaran



Ditandatangani secara elektronik
Tiara Cindhe Valerica



Laporan Keuangan KPKNL Kisaran Tahun 2025 (Unaudited) ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dilingkungan pemerintahan, Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 01 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun 2025 (Unaudited) adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp3.230.244.924,00 atau mencapai 111,68% dari Estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp2.892.526,00.

Realisasi Belanja Negara pada Tahun 2025 (Unaudited) adalah sebesar Rp 1.655.388.957,00 atau mencapai 79,19 % dari alokasi anggaran sebesar Rp2.090.491.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025.

Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp16.112.395.715,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp54.047.05,00, Aset Tetap (neto) sebesar Rp16.058.348.659.385,00; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0,00 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0,00.

Nilai Kewajiban dan *Ekuitas* masing-masing sebesar Rp10.198.472,00 dan Rp16.102.197.243,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non-operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp3.221.214.809,00, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp2.142.987.530,00 sehingga terdapat surplus dari kegiatan Operasional senilai Rp1.078.227.279,00 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non

Operasional dan Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp15.877.000,00 dan sebesar Rp0,00 sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar Rp1.094.104.279,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp16.493.421.972,00 ditambah surplus-LO sebesar Rp1.094.104.279,00 kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0,00 dan dikurangi transaksi antar entitas sebesar (Rp1.485.329.008,00) sehingga ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp16.102.197.243,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas, sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 (Unaudited) disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

*Laporan Realisasi Anggaran Untuk Periode Yang Berakhir Sampai Dengan
31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024*

Uraian	Catatan	Tahun 2025			31 Desember 2024 (Audited)
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi thdp Anggaran	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	2.892.526.000,00	3.230.244.924,00	111,68	830.873.933,00
Jumlah Pendapatan		2.892.526.000,00	3.230.244.924,00	111,68	830.873.933,00
BELANJA					
Belanja Operasi	B.2				
Belanja Pegawai	B.3	0,00	0,00	0	0
Belanja Barang	B.4	1.985.601.000,00	1.587.785.207,00	78,97	1.855.088.913,00
Belanja Bantuan Sosial	B.5	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Operasi		1.985.601.000,00	1.587.785.207,00	78,97	1.855.088.913,00
Belanja Modal					
Belanja Tanah	B.6	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Peralatan dan Mesin	B.7	80.000.000,00	67.703.750,00	84,50	546.439.388,00
Belanja Gedung dan Bangunan	B.8	0,00	0,00	0	1.946.493.903,00
Belanja Jalan, Irigasi, Jaringan	B.9	0,00	0,00	0	0,00
Belanja Modal Lainnya	B.10	0,00	0,00	0	0,00
Belanja Modal BLU	B.11	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Modal		80.000.000,00	67.703.750,00	84,50	2.492.933.291,00
Jumlah Belanja		2.090.491.000,00	1.655.388.957,00	79,19	4.348.022.204,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

II. NERACA

Neraca
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	0,00	0
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	763.769,00	0,00
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	2.670.430,00	120.649.563,00
Kas pada BLU	C.4	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek – BLU	C.5	0,00	0,00
Belanja Dibayar Dimuka	C.6	0,00	0,00
Uang Muka Belanja (prepayment)	C.7	0,00	0,00
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.8	0,00	0,00
Piutang Bukan Pajak	C.9	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	C.10	0,00	0,00
Bagian Lancar TP/TGR	C.11	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Tak Tertagih TP/TGR	C.12	0,00	0,00
Piutang dari kegiatan Operasional BLU	C.13	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	C.14	0,00	0,00
Persediaan	C.15	50.612.866,00	34.456280,00
Persediaan Belum diregister	C.16	0,00	0,00
Jumlah Aset Lancar		54.047.056	155.105843,00
Piutang Jangka Panjang			
Tagihan TP/TGR	C.17	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	C.18	0,00	0,00
Jumlah Piutang Jangka Panjang		0,00	0,00
Aset Tetap			
Tanah	C.19	7.669.363.000,00	7,669,363,000,00
Peralatan dan Mesin	C.20	4.172,918,256,00	4,145,627,557,00
Gedung dan Bangunan	C.21	9,029,679,863,00	9,029,679,863,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.22	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	C.23	9.969.500,00	9.969.500,00
KDP	C.24	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	C.25	(4.823.581.960)	(4,371,145,602)
Aset Tetap yang Belum Diregister	C.26	0,00	0
Jumlah Aset Tetap		16.058.348.659,00	16,483,494,318,00
Aset Lainnya			
Aset Tak Berwujud	C.27	0,00	0,00
Dana yang dibatasi penggunaannya	C.28	0,00	0,00
Dana Kelolaan Badan Layanan Umum	C.29	0,00	0,00
Dana Jangka Panjang	C.30	0,00	0,00
Aset Lain-lain	C.31	119.088.751,00	40,808,570,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.32	(119.088.751),00	(40,808,570),00
Jumlah Aset Lainnya		0,00	0,00
JUMLAH ASET		16.112.395.715,00	16.638.600.161,00
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.33	2.792.430,00	131,689,022,00
Utang yang belum ditagihkan	C.34	0,00	0,00
Hibah yang Belum Disahkan	C.35	0,00	0,00
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	C.36	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	C.37	7.406.042,00	13,489,167,00
Uang Muka dari KPPN	C.38	0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.39	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		10.198.472,00	145,178,189,00
Kewajiban Jangka Panjang			
Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN	C.40	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN		10.198.472,00	145,178,189,00
EKUITAS			

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

Laporan Keuangan KPKNL Kisaran Tahun 2025

Ekuitas	C.41	16.102.197.243,00	16,493,421,972,00
JUMLAH EKUITAS		16.102.197.243,00	16,493,421,972,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		16.112.395.715,00	16.638.600.161,00

II. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	3.221.214.809,00	2.804.053.742,00
Jumlah Pendapatan		3.221.214.809,00	2.804.053.742,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	0,00	0,00
Beban Persediaan	D.3	78.300.684,00	73.873.375,00
Beban Barang & Jasa	D.4	809.173.478,00	907.335.320,00
Beban Pemeliharaan	D.5	398.426.131,00	476.031.318,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6	285.562.128,00	380.000.593,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	571.525.109,00	590.254.555,00
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	D.8	0,00	0,00
Beban Lain-lain	D.9	0,00	0,00
Jumlah Beban		2.142.987.530,00	2.427.495.161,00
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		1.078.227.279,00	376.558.581,00
Kegiatan Non Operasional			
Surplus (Defisit) penjualan aset non-Lancar	D.10	15.877.000,00	5.908.000,00
Surplus (Depisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.11	0,00	0,00
Surplus (Defisit) dari kegiatan non operasional lainnya	D.12	0,00	0,00
Surplus (Defisit) dari kegiatan non operasional		15.877.000,00	5.908.000,00
Surplus (Defisit) sebelum Pos Luar Biasa		1.094.104.279,00	382.466.581,00
Pos Luar Biasa			
Pendapatan PNPB		0,00	0,00
Beban Perjalan Dinas		0,00	0,00
Beban Persediaan		0,00	0,00
Surplus/Defisit LO		1.094.104.279,00	382.466.581,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Ekuitas Awal	E.1	16.493.421.972,00	14.573.651.680,00
Surplus/Defisit LO	E.2	1.094.104.279,00	382.466.581,00
Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan		0,00	0,00
Dampak Kumulatif Perubahan		0,00	0,00
Kebijakan/Kesalahan Mendasar			
Lain-lain			
Penyesuaian nilai aset	E.3	0,00	0,00
Koreksi Nilai Persediaan	E.4	0,00	0,00
Koreksi atas Reklasifikasi	E.5	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset	E.6	0,00	0,00
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.7	0,00	0,00
Koreksi Lain-lain	E.8	0,00	0,00
Jumlah Lain-lain		0,00	0,00
Transaksi Antar Entitas	E.9	(1.485.329.008)	1.537.303.711
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	E.10	(391.224.729)	1.919.770.292
Ekuitas Akhir		16.102.197.243,00	16.493.421.972,00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum

A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013.
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.06/2010 tentang Kualitas Piutang Kementerian/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih.
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas PMK Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan BMN berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
9. Peraturan menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian LKKL sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2018 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup BUN dan Kementerian Negara/Lembaga.
11. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor PER-07/KN/2012 tentang tentang Penatausahaan Hasil Pengurusan Piutang dan Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata Cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Informasi Akrual

Pada Laporan Keuangan.

13. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

A.2. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis

KPKNL Kisaran dibentuk dengan tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. KPKNL Kisaran diharapkan dapat memfasilitasi tercapainya tertib administrasi, tertib hukum, tertib fisik dalam pengelolaan kekayaan negara, piutang Negara, dan lelang.

Untuk memenuhi ketentuan tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis DJKN. Rencana Strategis DJKN memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, KPKNL Kisaran berusaha memberikan pelayanan di bidang pengelolaan dan kekayaan negara, piutang negara dan lelang yang profesional dan bertanggung jawab kepada masyarakat sesuai dengan visi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yaitu ***“Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”***. Pengertian **profesional** dalam visi tersebut bermakna bahwa tugas-tugas pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan pelayanan lelang dilaksanakan sesuai prosedur, norma waktu, standar profesi dan standar keilmuan yang telah ditetapkan. Akuntabel adalah pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan pelaksanaan lelang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat adalah pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara dan pelaksanaan lelang dilaksanakan untuk kepentingan negara dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyat.

Sebagai wujud penjabaran visi yang telah dirumuskan tersebut, DJKN menetapkan 6 (enam) misi yaitu:

1. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara.

2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum.
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah.
4. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan.
5. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
6. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Untuk mengimplementasikan atau menjabarkan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu dan menggambarkan arah strategik organisasi sesuai dengan tugas dan fungsi, maka perlu menetapkan suatu tujuan. Tujuan yang hendak dicapai oleh KPKNL Kisaran untuk periode 2019-2025 adalah terselenggaranya pengelolaan kekayaan negara, penyelesaian pengurusan piutang negara, dan pelayanan lelang yang profesional, tertib, tepat guna, dan optimal serta mampu membangun citra baik bagi *stakeholder*.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, KPKNL Kisaran telah menentukan sasaran yang ingin dicapai dalam periode waktu tertentu. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang terukur dan telah ditetapkan secara spesifik serta dapat dicapai dalam jangka waktu satu tahun. Sesuai dengan Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2019-2025, terdapat 7 (tujuh) **sasaran** yang terkait dengan KPKNL Kisaran yaitu:

1. Terlaksananya perencanaan kebutuhan barang milik negara yang optimal.
Mengkoordinasikan pemberian data dan informasi keberadaan *asset idle* K/L dalam rangka perencanaan pengadaan belanja modal dari K/L.
2. Terlaksananya penatausahaan kekayaan negara yang andal dan akuntabel.
Penatausahaan kekayaan negara yang andal dan akuntabel adalah tercatatnya seluruh kekayaan negara/BMN dalam daftar barang baik di K/L sebagai pengguna dan di Kementerian Keuangan c.q. DJKN sebagai pengelola.
3. Terwujudnya pemanfaatan BMN berdasarkan prinsip *the highest and best use*. Pemanfaatan BMN adalah upaya penggunaan secara maksimal

seluruh BMN untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggara negara.

4. Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan pengelolaan kekayaan negara.

Pelayanan pengelolaan kekayaan negara meliputi pelayanan permohonan penetapan status, pemanfaatan, penggunaan, penghapusan, dan pemindahtanganan barang milik negara.

5. Terwujudnya *database* nilai kekayaan negara yang kredibel.

Mendapatkan, mengumpulkan, dan mengolah data kekayaan negara sehingga menjadi informasi eksekutif yang utuh, tepat waktu, akurat, dan dapat digunakan untuk proses pengambilan keputusan.

6. Tingkat pendapatan yang optimal.

Tingkat pendapatan yang optimal adalah tingkat pencapaian penerimaan dalam negeri yang sesuai dengan target sebagaimana tercantum dalam APBN atau APBN-P.

7. Tingkat kepercayaan *stakeholders* yang tinggi dan citra yang meningkat dengan didukung oleh tingkat pelayanan yang andal.

Tingkat kepercayaan *stakeholders* yang tinggi diukur berdasarkan hasil survei kepuasan *stakeholder* oleh lembaga independen atau internal DJKN. Hasil survei yang positif akan meningkatkan citra DJKN di mata *stakeholder*.

Dalam rangka mencapai sasaran tersebut di atas, maka diperlukan strategi yang harus ditempuh oleh KPKNL Kisaran. Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan jangka panjang dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan organisasi. Strategi KPKNL Kisaran yang akan ditempuh adalah:

1. Menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan lelang.
2. Menatausahakan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang dengan akurat dan akuntabel.
3. Meningkatkan pengamanan kekayaan negara baik secara administrasi, fisik dan tertib hukum.
4. Mengintegrasikan perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara (BMN)

dengan penganggaran.

5. Meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan lelang.
6. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara termasuk aset idle dan pengurusan piutang negara.
7. Meningkatkan penerimaan kembali (*recovery*) yang berasal dari pengeluaran pembiayaan APBN dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
8. Meningkatkan kesadaran (*awareness*) dan kemitraan dengan *stakeholder* dalam pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan lelang.
9. Meningkatkan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan pengelolaan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, dan lelang.
10. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), Organisasi, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dan Pengelolaan Anggaran.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, KPKNL Kisaran melaksanakan program: Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang. Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan oleh KPKNL Kisaran untuk mendapatkan suatu hasil.

Nilai Kinerja Organisasi KPKNL Kisaran Tahun 2025

Kode	IKU	V/C	Target Q4	Realisasi Q4	Indeks Max. 120%
	Stakeholder Perspective (30%)				120
1.	Pengelolaan kekayaan negara dan lelang yang proaktif, adaptif, dan terpercaya				112,14
1a- CP	Indeks Integritas	P/L	100	105.29	60,62

1b- CP	Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	P/M	100%	120	50,91
	Customer Perspective(20%)				111,33
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang optimal				102,65
2a- CP	Tingkat optimalisasi pengelolaan aset negara	P/L	100	110,42	40,35
2b- CP	Persentase realisasi pokok lelang	P/L	100	82,10	30
2c-CP	Persentase realisasi penurunan nilai saldo piutang negara	P/M	100	120,64	32,31
3	Pelayanan kekayaan negara dan lelang yang memenuhi kebutuhan pengguna jasa				120
3a- CP	Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi	P/M	74	93,43	60
3b-N	Indeks kepuasan pengguna layanan	P/M	77	95,55	60
	Internal Process Prespective (25%)				120
4	Penerapan tata kelola aset yang efektif				120
4a- CP	Persentase BMN berupa tanah yang disertipikatkan	P/M	100%	120,36	60

4b-CP	Persentase evaluasi kinerja BMN	P/M	100%	120	60
5	Pelayanan piutang negara, penilaian, dan lelang yang profesional dan produktif				120
5a- CP	Persentase realisasi penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara	P/M	100%	127,05	40
5b- CP	Tingkat kualitas layanan penilaian	P/M	70%	148,77	40
5c- CP	Persentase produktivitas lelang	P/M	80%	175,75	40
	Learning and Growth Prespective (25%)				119,06
6	Pengelolaan keuangan dan BMN yang akuntabel, serta SDM yang adaptif				120
6a- CP	Indeks kualitas kinerja anggaran	P/M	100	120	40
6b-N	Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	P/M	100	120	40
6c-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	P/M	80	121	40
7	Penanganan hukum dan komunikasi publik yang efektif				117,18
7a-CP	Indeks penanganan permasalahan hukum	P/M	100	114,36	57,18
7b-N	Indeks pengelolaan layanan informasi publik (PPID)	P/M	80	120	60

8	Pengawasan dan pengendalian internal, serta manajemen risiko yang efektif				120
8a-N	Indeks pengelolaan kinerja dan kualitas manajemen risiko	P/M	80	123,81	60
8b- N	Indeks capaian unit kerja dalam pembangunan ZI-WBK/WBBM	P/M	100	124,94	60
Nilai Kinerja Organisasi (NKO)					115,49

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

*Pendekatan
Penyusunan Laporan
Keuangan*

Laporan Keuangan Tahun 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh KPKNL Kisaran. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAKTI terdiri dari beberapa Modul, yaitu Modul Penganggaran, Modul Komitmen, Modul Bendahara, Modul Piutang, Modul Persediaan, Modul Aset Tetap dan Modul General Ledger Pelaporan (GLP). SAKTI Modul GLP diantaranya dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas, laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Jumlah entitas akuntansi satuan kerja KPKNL Kisaran adalah 1 entitas.

A.4 Basis Akuntansi

Basis Akuntansi

KPKNL Kisaran menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara

kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5 Dasar Pengukuran

Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan KPKNL Kisaran dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah, transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 (Audited) telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam

- **Pendapatan – LRA**

Pendapatan - LRA

Pendapatan adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat.

Pendapatan – LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).

- Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

- **Pendapatan-LO**

Pendapatan - LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah sebagai berikut:

- Penerimaan Bea Lelang Batal Atas Permintaan Penjual (setoran SSBP menggunakan MAP 425782). Pendapatan diakui pada saat diterimanya surat pemberitahuan pembatalan dari penjual oleh Kepala KPKNL dan disetor ke Rekening Penampungan Lelang KPKNL;
- Penerimaan Uang Jaminan Penawaran Lelang dari Pembeli Wanprestasi (setoran SSBP menggunakan MAP 425782). Pendapatan diakui pada saat telah ditetapkannya Pembeli Lelang wanprestasi oleh Pejabat Lelang.
- Penerimaan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara dari Penanggung Hutang (setoran SSBP menggunakan MAP 425785). Pendapatan diakui pada saat telah pastinya pembayaran angsuran atau penarikan yang dindikasikan oleh telah diterimanya pembayaran oleh Bendahara Penerima atau telah masuk ke

dalam rekening Bendahara Penerima dan telah terverifikasi.

- Penyetoran atas Penerimaan Piutang Negara Yang Tidak Jelas (setoran SSBP menggunakan MAP 425999). Pendapatan diakui setelah Proses verifikasi dan konfirmasi dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak penerimaan tersebut masuk ke Rekening Penampungan Piutang dan telah disetorkan ke Kas Negara;
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

- **Belanja**

Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat.

Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- **Beban**

Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa

pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

• Aset

*Kebijakan
Akuntansi atas
Aset*

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non- keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

• Aset Lancar

Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Piutang yang timbul dari Tuntutan Perhendaharaan Ganti Rugi, apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b. Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal,

- c. Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut :

Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%

Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/ DJKN	100%
-------	--	------

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian,
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, dan
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

a. Aset Tetap

Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - (a). Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - (b). Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);

- (c). Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang jdih.kemenkeu.go.id - 240 - (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

b. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No. 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penerapan penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada seluruh entitas Pemerintah Pusat dilaksanakan mulai tahun 2013, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

*Penyusutan
Aset Tetap*

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut tersaji dalam tabel berikut.

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

c. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

- Tuntutan Perbendaharaan (TP) adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.
- TPA dan TGR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya.

d. Aset Lainnya

Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya,

- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil, sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2021 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset tetap	Masa Manfaat
Software	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten 10 tahun Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun
Hak Ekonomi, Lembaga 20 tahun Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni 25 tahun Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. 50 tahun II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70 tahun

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

6. Kewajiban

Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban

jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

B. Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

C. Implementasi Sistem Akuntansi Tingkat Instansi (SAKTI)

*Implementasi
Sistem Akuntansi
Tingkat Instansi
(SAKTI)*

Mulai tahun 2018 KPKNL Kisaran telah mulai melaksanakan implementasi SAKTI (Sistem Akuntansi Tingkat Instansi) yang mengintegrasikan seluruh aplikasi yang berkaitan dengan laporan keuangan yaitu RKAKL-DIPA, SAS/SPM, Persediaan, SIMAK BMN & SAIBA, yang terdiri dari beberapa modul yaitu modul penganggaran, komitmen, PPSPM, bendahara penerimaan/ pengeluaran, piutang, aset tetap, persediaan, dan *General Ledger*

Untuk KPKNL Kisaran ini pelaksanaan implementasi SAKTI nya termasuk ke dalam Tahap IIIB yang mana sebelumnya sudah dilakukan implementasi SAKTI pada internal Ditjen Perbendaharaan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, p-os-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2017 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis full akrual.

A.7. PRIORITAS NASIONAL

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, pada Kementerian Keuangan RI terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu Rekomendasi BMN Berupa Tanah Yang Disertifikatkan.

Adapun pagu anggaran untuk kegiatan tersebut adalah sebesar Rp6.617.000 dan realisasi sebesar 46,17% dengan rincian sebagai berikut.

Nama Satker	Program Prioritas	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Satuan RO	Targ et	Capai an	%
KPKNL Kisaran	Prioritas Nasional Memperkuat stabilitas dan transformasi Pelayanan Publik	9.329.000	7.016.500	Rekomen dasi	470	470	100
	Jumlah	9.329.000	7.016.500	Rekomen dasi	37	470	100

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Pagu belanja
Rp2.090.491.000,
00.

Satuan kerja KPKNL Kisaran memperoleh alokasi anggaran Tahun 2025 sebesar Rp2.090.491.000,00.

B.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Realisasi
Pendapatan
Negara dan Hibah
Rp2.045.553.096,0
0

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 3.230.244.924,00 atau sudah mencapai 111,68 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp2.892.526.000,00. Pendapatan Satuan Kerja KPKNL Kisaran terdiri dari pendapatan jasa lainnya, pendapatoan, bunga, pengelolaan rekening Perbankan dan iuran badan serta pendapatan denda, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian estimasi dan realisasi PNBP sampai dengan tanggal pelaporan dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	2.201.000	1.442.843	65,55
2	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	1.155.330.000	700.855.582	60,66
3	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas 1	1.732.995.000	2.498.903.903	144,20
4	Pendapatan jasa Lainnya	-	500.000	
5	Pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan	2.000.000	18.084.500	
6.	Pendapatan Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	10.458.096	
7	Pendapatan Penjualan Peralatan dan Mesin	-	-	
	Jumlah	2.892.526.000	3.230.244.924	111,68

Realisasi PNBP TA 2025 mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp3.230.244.924,00 atau 111,68% dari realisasi 31 Desember 2024 yaitu Rp2.821.130.993,00. Perbandingan realisasi PNBP TA 2025 dan 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Laporan Keuangan KPKNL Kisaran Tahun 2025

No.	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
1	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	1.442.843	1.170.935	271.908,00	19%
2	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	700.855.582	907.216.586	-206.361.004,00	-29%
3	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	2.498.903.903	1.769.546.152	729.357.751,00	29%
4	Pendapatan jasa Lainnya	500.000	1.000.000	-500.000,00	-100%
5	Pendapatan sewa tanah, gedung dan Bangunan	2.207.500	14.430.000	-12.222.500,00	-554%
6	Pendapatan Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	4.619.000	-4.619.000,00	
7	Pendapatan Penjualan Peralatan dan Mesin	15.877.000	1.289.000	14.588.000,00	92%
8	Pendapatan Anggaran Lain-lain	10.458.096	113.488.025	-103.029.929,00	-985%
9	Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih Lelang yang tidak diambil yang berhak	-	-	0,00	
10	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	-	8.371.295	-8.371.295,00	-100%
	Pengembalian Pendapatan	-	-	0,00	
	Jumlah	3.230.244.924,00	2.821.130.993,00	409.113.931,00	14,50

B.2. Belanja

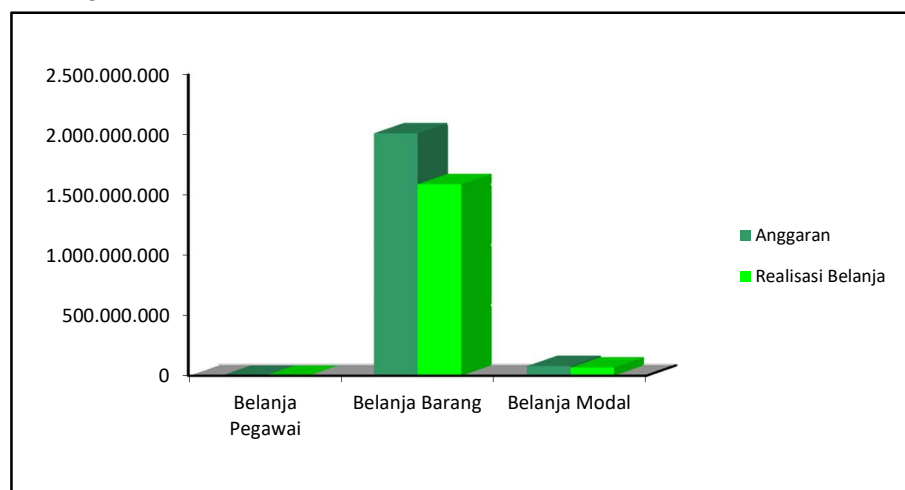
Realisasi Belanja
Negara
Rp1.777.583.676,00

Realisasi belanja *KPKNL Kisaran* pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp1.656.086.957,00 atau sebesar 79,19 persen dari anggarannya setelah dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp698.000,00. Adapun besar anggaran belanja *KPKNL Kisaran* Tahun 2025 adalah sebesar Rp2.090.491.000,00.

Rincian anggaran dan realisasi belanja Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	%
51	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00
52	Belanja Barang	2.010.491.000,00	1.588.483.207,00	78,97
53	Belanja Modal	80.000.000,00	67.603.750,00	84,50
	Total Belanja Kotor	2.090.491.000,00	1.656.086.957,00	79,21
	Pengembalian	0	698.000,00	0,00
	Total Belanja Netto	2.065.601.000,00	1.655.388.957,00	79,19

Komposisi anggaran dan realisasi belanja pada Tahun 2025 dapat dilihat pada grafik berikut :



Realisasi belanja KPKNL Kisaran per kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Kode Kegiatan	Uraian Kegiatan	Anggaran	Realisasi Belanja (Rp)	% Real thd Angg
Rupiah Murni (01)				
4796	Komunikasi, Edukasi dan Standardisasi	1.035.000	975.000	94,20
4798	Pengelolaan Aset	155.684.000	143.233.915	88,44
4700	Legislasi dan Litigasi	22.088.000	19.746.000	89,40
4701	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	1.585.820.000	1.429.488.482	90,14
4702	Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik	21.252.000	12.277.600	57,77
4704	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	13.004.000	11.267.000	86,64
PNBP (04)				
4796	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	-	-	0,00
4798	Pengelolaan Aset	39.707.000	39.098.960	98,47
Jumlah		1.838.590.000	1.656.086.957	90,07

Perbandingan realisasi belanja Tahun 2025 dan 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Naik/(Turun)	
		31 Desember 2025	31 Desember 2024	Rp	%
51	Belanja Pegawai	0,00	0,00	0,00	0
52	Belanja Barang	1.588.483.207,00	1.008.356.931,00	647.730.026,00	39
53	Belanja Modal	67.603.750,00	943.752.000,00	(876.148.520)	(92,83)
	Jumlah	1.656.086.957,00	1.952.108.931,00	(228.418.224)	

B.3 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai
Rp0,00

Belanja Pegawai adalah pengeluaran yang merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam maupun luar negeri baik kepada pejabat negara, Pegawai Negari Sipil (PNS) dan pegawai yang diperkerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dikerjakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi belanja pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 tidak ada realisasi karena mulai 1 Agustus 2020 pembayaran gaji pegawai sudah dipindahkan terpusat di Kantor Pusat DJKN dan terhitung mulai 1 Juli 2022 pembayaran gaji dipusatkan pada satker Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, sehingga pada satker KPKNL Kisaran tidak ada pagu maupun realisasi pembayaran untuk periode laporan ini.

B.4 Belanja Barang

Belanja Barang
Rp1.588.483.207,00

Belanja Barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan.

Realisasi Belanja Barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.588.483.207,00 dan Rp1.008.356.931. Realisasi belanja barang pada Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 39 persen dari realisasi

belanja barang 31 Desember 2024. Kenaikan realisasi belanja barang ini dipengaruhi dari adanya kebijakan buka blokir di September 2025 dari efisiensi belanja barang operasional yang sebelumnya dilakukan berdasarkan Inpres 1 Tahun 2025.

Rincian Belanja Barang **TA 2025 dan 31 Desember 2024** dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/ (Turun)	%
Belanja Barang Operasional	787.667.578	741.373.065	46.294.513,00	6,24
Belanja Barang Non Operasional	21.672.100	27.320.000	-5.647.900,00	-20,67
Belanja Barang Persediaan	94.457.270	92.298.367	2.158.903,00	2,34
Belanja Jasa	-	138.065.570	-138.065.570,00	-100,00
Belanja Pemeliharaan	398.726.131	476.031.318	-77.305.187,00	-16,24
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	285.960.128	380.000.593	-94.040.465,00	-24,75
Belanja Perjalanan Luar Negeri	-	-	0,00	0,00
Belanja Barang BLU	-	-	0,00	0,00
Total Belanja Barang Kotor	1.588.483.207	1.855.088.913	-266.605.706,00	-14,37
Total Pengembalian Belanja Barang	698.000		698.000,00	0,00
Total Belanja Barang Netto	1.587.785.207,00	1.855.088.913,00	-267.303.706,00	-14,41

B.5 Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual.

Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp67.603.750,00 dan Rp 2.492.933.291,00.

Rincian Belanja Modal **TA 2025 dan 31 Desember 2024** dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/ (Turun)	%
Belanja Modal Tanah	-	-	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	67.603.750	546.439.388	-478.835.638,00	-87,63
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	1.946.493.903	-1.946.493.903,00	-100,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi	-	-	0,00	0,00
Belanja Modal Lainnya	-	-	0,00	0,00
Belanja Modal BLU	-	-	0,00	0,00
Total Belanja Modal Kotor	67.603.750	2.492.933.291	-2.425.329.541,00	-97,29
Total Pengembalian Belanja Modal	-	-	0,00	0,00
Total Belanja Modal Netto	67.603.750,00	2.492.933.291,00	-2.425.329.541,00	-97,29

B.6 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2025 dan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

URAIAN JENIS BELANJA	Tahun 2024 (Unaudited)	Tahun 2023 (Audited)	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	0	0,00
Belana Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja Bersih	0	0	0,00

B.7 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp67.603.750,00 dan Rp546.439.388,00.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 mengalami penurunan dibandingkan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2024 yang dipengaruhi oleh keterbatasan alokasi belanja modal peralatan dan mesin dalam pagu anggaran KPKNL Kisaran Tahun 2025.

URAIAN JENIS BELANJA	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik (Turun) %
Peralatan dan mesin	67.603.750	546.439.388	-88%
Penambahan nilai peralatan dan mesin	-	-	0,00
Peralatan da Mesin - Penanganan pandemi	-	-	0,00
Jumlah Belanja Kotor	67.603.750	546.439.388	0,00
Pengembalian Belanja Modal	-	-	0,00

B.8 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp1.946.493.903,00.

*Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
Rp67.603.750,00*

*Belanja Modal
Gedung dan
Bangunan Rp0,00*

Tahun 2025 tidak ada pagu alokasi belanja modal gedung dan bangunan pada anggaran KPKNL Kisaran. Perbandingan realisasi belanja modal gedung dan bangunan 31 Desember 2025 dibandingkan 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

URAIAN JENIS BELANJA	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik (Turun)
- Gedung dan Bangunan	-	1.674.259.000	-100%
- Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	-	-	0%
- Upah tenaga kerja dan honor pengelola gedung dan bangunan	-	-	0%
- Perjalanan gedung dan bangunan	-	-	0%
- Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan		272.234.903	-100%
Jumlah Belanja Kotor	0	1.946.493.903	-100%
Pengembalian Belanja Modal	0	-	0,00
Jumlah Belanja Bersih	0	1.946.493.903	-1,00

B.9 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Perbandingan realiasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan TA 2025 dibandingkan 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

URAIAN JENIS BELANJA	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik (Turun) %
- Irigasi	0	0	0,00
- Jaringan	0	0	0,00
- Penambahan nilai jaringan	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja Bersih	0	0	0,00

B.10 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Perbandingan realiasi belanja modal lainnya TA 2025 dibandingkan 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

URAIAN JENIS BELANJA	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik (Turun) %
Modal lainnya		0	0,00
Penambahan nilai aset tetap lainnya	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	0	0	0,00
Pengembalian Belanja Modal	0	-	0,00
Jumlah Belanja Bersih	0	0	0,00

Belanja Modal Jalan,
Irigasi dan Jaringan
Rp0,00

Belanja Modal
Lainnya Rp0,00

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA**Aset Lancar**

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Nilai Aset Lancar KPKNL Kisaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp295.691.898,00 dan Rp155.105.843,00.

Rincian Aset Lancar pada KPKNL Kisaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan/ Penurunan
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	0,00
2	Kas di Bendahara Penerimaan	763.760,00	0,00	0,00
3	Kas Lainnya dan Setara Kas	2.670.430,00	120.649.563,00	(117.979.133,00)
6	Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)	0,00	0,00	0,00
7	Uang Muka Belanja (Prepayment)	0,00	0,00	0,00
8	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	0,00	0,00	0,00
9	Piutang Bukan Pajak (Netto)	0,00	0,00	0,00
10	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (Netto)	,00	0,00	0,00
11	Piutang dari kegiatan Operasional BLU (Netto)	0,00	0,00	0,00
12	Persediaan	50.612.866,00	34.456.280,00	16.156.586,00
13	Persediaan yang belum deregister	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	54.047.056,00	155.105.843,00	(101.058.787,00)

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan atau Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas (termasuk bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan) yang sumbernya berasal dari dana kas kecil (UP/TUP) yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetor kembali ke Kas Negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran KPKNL Kisaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar 0,00, dengan rincian sebagai berikut :

Keterangan	30 Juni 2025	30 Juni 2024
Saldo Rekening	-	-
Uang Tunai	-	-
Kuitansi belum dipertanggungjawabkan	-	-
	-	-

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran atau saldo UP/TUP di 31 Desember 2025 tidak ada karena telah disetorkan sisanya ke kas negara.

C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp2.670.430,00

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan dana selain Uang Persediaan (UP/TUP) yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran di lingkungan KPKNL Kisaran berupa dana pihak ketiga yang dikelola oleh Bendahara Penerimaan/Pengeluaran serta pajak pajak yang sudah dipungut oleh bendahara penerimaan/pengeluaran namun belum disetorkan ke kas Negara serta kas lainnya di BLU.

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp2.670.430,00 dan Rp120.649.563,00 yang merupakan kas berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran maupun bendahara penerimaan yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai.

Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	2.670.430,00	120.649.563
	2.670.430,00	120.649.563

C.3 Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp50.612.866,00 dan Rp34.456.280,00, dengan rincian sebagai berikut:

Persediaan
Rp50.612.866,00

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Barang Konsumsi	50.612.866,00	34.456.280,00
Bahan untuk Pemeliharaan	0,00	0,00
Suku Cadang	0,00	0,00
Pita Cukai Materai dan Leges	0,00	0,00
ATL untuk diserahkan kepada Masyarakat	0,00	0,00
Bahan Baku	0,00	0,00
Persediaan Lainnya	0,00	0,00
Jumlah	50.612.866,00	34.456.280,00

Keterangan :

- Persediaan senilai Rp0,00 dalam kondisi rusak;
- Persediaan senilai Rp0,00 dalam kondisi usang.

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Aset Tetap

Aset Tetap
Rp16.258.550.385,00

Saldo aset tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 tersaji sebesar Rp 16.058.348.659,00 dan Rp16.483.494.318,00.

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset tetap pada KPKNL Kisaran berupa tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan dan aset tetap lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Tanah	7.669.363.000,00	7.669.363.000,00
2	Peralatan dan Mesin	4.172.918.256,00	4.145.627.557,00

Laporan Keuangan KPKNL Kisaran Tahun 2025

3	Gedung dan Bangunan	9,029,679,863,00	9,029,679,863,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00
5	Aset Tetap Lainnya	9.969.500,00	9.969.500,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
7	Aset Tetap yang Belum Diregister	0,00	0
Jumlah Aset Tetap		20.881.930.345,00	20.854.639.920,00
Akumulasi Penyusutan		(4.823.581.960,00)	(4.371.145.602,00)
Nilai Buku Aset Tetap		16.058.348.659,00	16.483.494.318,00

C.4 Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki KPKNL Kisaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp7.669.363.000,00 dan Rp7.669.363.000,00.

Tanah
Rp7.669.363.000,00

Saldo per 1 Januari 2025	7.669.363.000
Mutasi Tambah :	
112 Perolehan Lainnya	0,
102 Transfer Masuk	-
Mutasi Kurang :	
302 Transfer keluar	0,
Saldo per 31 Desember 2025	7.669.363.000

Untuk saldo tanah, tidak terdapat mutasi tambah dan mutasi kurang. Pada tanggal pelaporan semua tanah tersebut dikuasai dan digunakan oleh KPKNL Kisaran. Rincian saldo tanah per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

No.	Alamat Lokasi Tanah	Luas (m2)	Nilai
1	Jalan Prof. H.M. Yamin No. 47 Kisaran	2.368	7.066.601.000
2	Jalan Nusa Indah, Kisaran Naga, Kota Kisaran Timur, KAB. ASAHAN	524	400.000.000,00
3	Perumahan Taman Pelita Permai Blok A No. 5-A Jalan Sei Silau	180	202.762.000,00
		3.072	7.669.363.000,00

C.5 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin
Rp4.172.918.256,00

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin KPKNL Kisaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah Rp4.172.918.256,00 dan Rp4.145.627.557,00. Nilai buku Aset Peralatan dan Mesin pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya. Akumulasi penyusutan peralatan dan mesin adalah sebesar Rp3.414.419.864,00. Dengan demikian nilai buku sebesar Rp758.498.392,00.

Rincian mutasi nilai aset peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai

berikut.

Saldo per 1 Januari 2025	4.145.627.557
Mutasi Tambah :	
100 Koreksi Saldo awal	-
101 Pembelian	-
102 Transfer Masuk	78.775.700
103 Hibah masuk	-
105 Penyelesaian Pembangunan dgn KDP	-
106 Pembatalan Penghapusan	-
107 Reklasifikasi Masuk	-
112 Perolehan Lainnya	-
115 Input perolehan BMN oleh Tim Pengemb	-
177 Reklas dari aset lainnya ke aset tetap	-
Perolehan Reklas dari intra ke ekstra/sebalikr	-
202 Pengembangan Nilai Aset	-
204 Koreksi Pencatatan	-
208 Pengembangan melalui KDP	-
402 Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan	-
Mutasi Kurang :	
204 Koreksi Pencatatan Nilai/uantitas	-
301 Penghapusan	51.485.001
302 Transfer keluar	-
304 Reklasifikasi keluar	-
305 Koreksi Pencatatan	-
401 Penghentian aset dari penggunaan	-
911 Pencatatan barang yang mau dihapuskan	-
Belum teridentifikasi	-
Saldo per 31 Desember 2025	4.172.918.256

C.6 Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp9.029.679.863,00 dan Rp9,029,679,863,00. Sedangkan nilai buku Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutannya adalah sebesar Rp1.409.162.096,00. Tidak terdapat mutasi tambah atau kurang pada gedung dan bangunan.

Rincian mutasi gedung dan bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2025	9.029.679.863
Mutasi Tambah :	
101 Pembelian	-
208 Pengembangan melalui KDP	-
Mutasi Kurang :	
264 Koreksi pencatatan Nilai berkurang	-
304 Reklasifikasi keluar	-
Saldo per 31 Desember 2025	9.029.679.863

C.7 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan kedalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.

Saldo Aset Tetap Lainnya pada KPKNL Kisaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp9.969.500,00 dan Rp9.969.500,00. Aset tetap lainnya tersebut berupa bahan perpustakaan tercetak. Nilai buku Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebesar Rp9.969.500 yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan.

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2025	9.969.500
Mutasi Tambah :	
105 Penyelesaian Pembangunan dengan KDP	
Mutasi Kurang :	
401 Penghentian aset dari penggunaan	-
Saldo per 31 Desember 2025	9.969.500

Tidak terdapat mutasi tambah/kurang pada aset berupa aset tetap lainnya. Sampai dengan 31 Desember 2025, tidak ada realisasi belanja modal lainnya dan mutasi aset yang berasal dari pembelian/pengembangan langsung.

C.8 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp(4.823.581.960,00) dan Rp(4.371.145.602,00).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDO).

Berikut disajikan rincian akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Tanah	7.669.363.000,00	0	3.798.662.202,00
2	Peralatan & Mesin	4.172.918.256,00	3.414.419.864,00	758.498.392,00
3	Gedung & Bangunan	9.029.679.863,00	1.409.162.096,00	7.620.517.767
4	Jalan, Irigasi & Jaringan	0,00	0,00	0,00
5	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0	0,00
6	Aset Tetap Lainnya	9.969.500,00	0,00	9.969.500,00
7	Aset Tetap yang belum Diregister	0	0	0,00

	<i>Jumlah</i>	21.082.132.345,00	(4.823.581.960,00)	16.058.348.659,00
--	---------------	-------------------	--------------------	-------------------

Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan membayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Nilai Kewajiban Jangka Pendek KPKNL Kisaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp312.802.266,00 dan Rp 145.178.189,00, dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Kewajiban Jangka Pendek	TA 2025	TA 2024
1	Utang kepada Pihak Ketiga	2.792.430,00	131.689.022,00
2	Utang yang Belum Ditagihkan	0,00	0,00
3	Hibah yang belum disahkan	0,00	0,00
4	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	0,00	0,00
5	Pendapatan Diterima Dimuka	7.406.042,00	13.489.167,00
6	Uang Muka dari KPPN	0,00	0,00
7	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	10.198.472,00	145.178.189,00

C.9 Utang kepada Pihak Ketiga

*Utang Pihak Ketiga
Rp2.670.430,00*

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp2.792.430,00 dan Rp131.689.022,00.

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan.

Adapun Rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada KPKNL Kisaran per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut

Uraian	Nilai
Belanja Pegawai yang belum dibayar	-
Belanja Barang yang masih harus dibayar	-
Belanja Modal yang belum dibayar	-
Utang kepada Pihak Ketiga BLU	-
Pegeluaran Transit yang masih harus dibayar	-
Utang kepada Pihak ketiga lainnya	-
Dana Pihak ketiga	2.792.430,00
Dana Pihak ketiga Lainnya - BLU	-
Jumlah	2.792.430,00

C.10 Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka dari KPPN
Rp0,00*

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Uang muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Semua sisa Uang Persediaan telah disetorkan ke rekening kas negara sebelum 31 Desember 2025.

C.11 Utang Jangka Pendek Lainnya

*Utang jangka pendek
lainnya Rp0,00.*

Nilai utang jangka pendek lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

C.12 Ekuitas

*Ekuitas
Rp16.241.440.017,00.*

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing Rp 16.102.197.243,00 dan Rp16,493,421,972,00.

Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Surplus (Defisit) Laporan Operasional

Merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa. Surplus/defisit untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.094.104.279,00 dan Rp382.466.581,00

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp3.221.214.809,00 dan Rp2.804.053.742,00. Pendapatan tersebut terdiri dari :

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik /Turun (%)
Pendapatan Sumber Daya Alam	-	-	-
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	-	-	-
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	3.221.214.809	2.804.053.742	15
	-	-	
	3.221.214.809	2.804.053.742	15

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2025 dan 31 Desember 2025 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Beban pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Mulai 1 Agustus 2020 pembayaran gaji pegawai KPKNL Kisaran sudah dipindahkan terpusat di Kantor Pusat DJKN dan terhitung mulai 1 Juli 2022 pembayaran gaji dipusatkan pada satker Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, sehingga pada satker KPKNL Kisaran tidak ada pagu maupun realisasi pembayaran untuk periode laporan ini sehingga pada laporan keuangan ini tidak terdapat beban belanja pegawai.

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan
Rp78.300.684,00

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp78.300.684,00 dan Rp73.873.375,00.

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi/pemakaian atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik (Turun) %
Beban Persediaan Konsumsi	78.300.684	73.873.375	5,99
Jumlah	78.300.684	73.873.375	5,99

D.4 Beban Barang & Jasa

Beban Persediaan
Rp809.173.478,00

Jumlah Beban Barang dan Jasa pada TA 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp809.173.478,00 dan Rp907.335.320,00.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/ atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik (Turun) %
Beban Barang dan Jasa	809.173.478	907.335.320	- 10,82
Jumlah	809.173.478	907.335.320	- 10,82

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan
Rp398.426.131,00

Beban Pemeliharaan pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp398.426.131,00 dan Rp213.955.703,00.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian beban pemeliharaan untuk periode 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Laporan Keuangan KPKNL Kisaran Tahun 2025

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	260.480.795	285.508.597	-10%
Beban Pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya	-	-	0%
Beban pemeliharaan jaringan	-	-	0%
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	138.245.336	190.522.721	-27%
Beban pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	-	-	0%
Beban Pemeliharaan Lainnya	-	-	0%
Beban pemeliharaan	-	-	0%
Pengembalian beban pemeliharaan peralatan dan mesin	(300.000)	-	0%
Jumlah	398.426.131	476.031.318	-16%

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan
Dinas
Rp285.562.128,00

Beban Perjalanan Dinas pada TA 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar R285.562.128,00 dan Rp218.885.226,00.

Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	275.360.128	369.250.593	(25,43)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	10.600.000	10.750.000	(1,40)
Beban Perjalanan Dinas Meeting Dalam Kota	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	-	-	-
Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	-	-	-
Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Biasa	(398.000)	-	-
Jumlah	285.562.128	380.000.593	(24,85)

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp571.525.109,00

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp571.525.109,00 dan Rp590.254.555,00.

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2025 dan 31

Laporan Keuangan KPKNL Kisaran Tahun 2025
Desember 2024 adalah sebagai berikut :

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	360.136.648	398.414.557	(9,61)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	211.388.461	191.839.998	10,19
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Beban Penyusutan Aset Lainnya	-	-	-
Jumlah Penyusutan	571.525.109	590.254.555	(3,17)
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	-
Beban Amortisasi Aset Lain-lain	-	-	-
Beban penyusutan aset kelolaan BUN	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	571.525.109	590.254.555	(3,17)

D.8 Kegiatan Non Operasional

Surplus/Defisit dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp15.877.00,00

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

URAIAN JENIS BEBAN	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik (Turun) %
Surplus Penjualan Aset Non Lancar			
Penjualan peralatan dan mesin	15.877.000,00	5.908.000,00	-
Tukar menukar peralatan dan mesin	-	-	-
Pemindahtanganan BMN lainnya	-	-	-
Beban pelepasan aset non lancar	-	-	-
Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional	-	-	-
Pendapatan selisih kurs terealisasi - BLU	-	-	-
Penerimaan kembali belanja barang BLU TAYL	-	-	-
Pendapatan penyelesaian TGR	-	-	-
Pendapatan penyelesaian TP	-	-	-
Penerimaan kembali B.Peg TAYL	-	-	-
Penerimaan kembali B.Brg TAYL	-	-	-
Penerimaan kembali B.Mdl TAYL	-	-	-
Pendapatan selisih kurs yang belum terealisasi BLU	-	-	-

Laporan Keuangan KPKNL Kisaran Tahun 2025

Pendapatan Perolehan aset lainnya	-	-	-
Pendapatan penyesuaian nilai persediaan	-	-	-
Beban dari kegiatan non operasional lainnya	-	-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	15.877.000,00	5.908.000,00	-

Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

Rincian Pos Luar Biasa TA 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut

URAIAN	30 Juni 2025	30 Juni 2024	Naik (Turun) %
Pendapatan PNB	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas	-	-	-
Beban Persediaan	-	-	-
Jumlah	-	-	-

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah. Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp16.102.197.243,00 dan Rp16.493.421.972,00, terdiri dari :

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik (Turun) %
Ekuitas awal	16.493.421.972	14.573.651.680	13,17
Surplus (Defisit) LO	1.094.104.279	382.466.581	186,07
Koreksi yang menambah/mengurangi		-	-
Transaksi antar entitas	(1.485.329.008)	1.537.303.711	(196,62)
Kenaikan/Penurunan ekuitas	(391.224.729)	1.919.770.292	(120,38)
Ekuitas akhir	16.102.197.243	16.493.421.972	(2,37)

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp16.493.421.972,00 dan Rp14.573.651.680,00.

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus/defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar surplus Rp1.094.104.279,00 dan surplus Rp382.466.581,00.

Surplus/Defisit LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa.

E.3 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp(1.485.329.008) dan Rp1.537.303.711,00.

Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal K/L, antar K/L, antar BUN, maupun K/L dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

Uraian	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	1.655.388.957
Diterima dari Entitas Lain	-3.230.244.924
Transfer Keluar	10.751.259
Transfer Masuk	78.775.700
Transaksi Pengelolaan Investasi BA BUN pada BLU	0
Jumlah	-1.485.329.008

➤ Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara

(BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2025, DDEL sebesar – Rp3.230.244.924,00 sedangkan DKEL sebesar Rp1.655.388.957,00.

➤ Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal K/L, antar K/L, dan antara K/L dengan BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp78.775.700 dan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 sebesar Rp10.751.259,00.

E.10 Kenaikan/Penurunan Ekuitas

Kenaikan/penurunan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp-391.224.729,00 dan Rp1.919.770.292,00.

Kenaikan/Penurunan
ekuitas sebesar
(Rp391.224.729,00)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Surplus/Defisit LO	1.094.104.279	382.466.581
Koreksi Nilai aset Non Revaluasi	0	0
Koreksi Nilai aset Non Revaluasi	0	0
Koreksi lainnya	0	0
Transaksi antar entitas	-1.485.329.008	1.537.303.711
Jumlah	-391.224.729	1.919.770.292

Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp16.102.197.243,00 dan Rp16.493.421.972,00.

Ekuitas Akhir
Rp16.102.197.243,00

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor 234/BALAP.5/2015 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Nomor 023/BALAP.5/2015 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran. Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penanggung Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM, dan Bendahara Pengeluaran pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kisaran tanggal 11 Februari 2025 telah ditetapkan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bontang Nomor KEP-18/KNL.0203/2025 tentang Penunjukan Petugas Pengelola Pengguna Anggaran Di Lingkungan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Kisaran Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut:

Kuasa Pengguna Anggaran	:	Melly Maiesta
Pejabat Pembuat Komitmen	:	Danar Sevi Aji
Pejabat Penandatangan/Penguji SPM	:	Muhammad Iqbal
Bendahara	:	Adelia T.R. Hutapea
Staf PPK	:	Sri Hartati
		Puspita Sari Pinem
		Sari Solikhati

F.2 Capaian Rincian Output Per Fungsi APBN

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pemerintahan, anggaran Belanja Negara untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kisaran dialokasikan berdasarkan fungsi Pelayanan Umum. Nilai capaian rincian output fungsi Pelayanan Umum dalam pelaksanaan APBN Tahun 2025 pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kisaran adalah 100. Ringkasan informasi kinerja satuan kerja tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Laporan Keuangan KPKNL Kisaran Tahun 2025

Uraian Output	Belanja			Output		
	Pagu	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	53.354.000	44.434.500	83,28	65	65	100,00
Keputusan Hasil Pengurusan/ Pengelolaan Piutang	33.876.000	33.184.015	97,96	13	13	100,00
Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset	13.240.000	12.599.000	95,16	138	138	100,00
Sosialisai Pengelolaan Kekayaan Negara	10.227.000	975.000	9,53	2	2	100,00
Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara	9.688.000	-	0,00	2	2	100,00
Sosialisasi/Edukasi di Bidang Lelang	2.647.000	-	0,00	1	1	100,00
Risalah Lelang	23.656.000	23.047.960	97,43	350	350	100,00
Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara	24.040.000	23.806.000	99,03	2	2	100,00
Rekomendasi Hasil Penilaian	16.800.000	12.591.900	74,95	2	2	100,00
Penggalian Potensi Lelang	39.298.000	16.051.000	40,84	2	2	100,00
Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan	10.254.000	9.020.500	87,97	470	470	100,00
Aset BUN yang Dikelola	8.828.000	7.200.000	81,56	2	2	80,00
Pembinaan/Edukasi Publik	14.360.000	5.081.600	35,39	30	30	6,00
Kehumasan	9.868.000	4.841.000	49,06	5	5	74,00
Pameran/Eksibisi	5.000.000	2.355.000	47,10	1	1	6,00
Kerumahtanggaan	102.443.000	81.033.753	79,10	12	12	100,00
Layanan Bantuan Hukum	22.088.000	19.746.000	89,40	20	20	100,00
Layanan Perkantoran	1.581.816.000	1.280.550.979	80,95	12	12	100,00
Peralatan Fasilitas Perkantoran	24.000.000	23.603.750	98,35	4	4	100,00
Kendaraan Bermotor	56.000.000	44.000.000	78,57	2	2	100,00
Rekomendasi Kepatuhan Internal	29.008.000	11.267.000	38,84	5	5	100,00

F.3 Nilai IKPA

Nilai capaian Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) baik yaitu 100%.

Indikator IKU Indeks Kinerja Anggaran			Capaian s.d Triwulan IV
A. Nilai IKPA			100
	1	Revisi DIPA	100%
	2	Deviasi Hal III DIPA	100%
	3	Belanja Kontraktual	0%

	4	Pengelolaan UP dan TUP	100%
	5	Dispensasi SPM	0%
	6	Penyerapan Anggaran	100%
	7	Penyelesaian Tagihan	%
	8	Capaian Output	100%
B. Nilai SMART			94,93
Nilai Capaian IKU IKA s.d Triwulan IV			97,465
Realisasi Capaian IKU IKA			120

F.4 Capaian Output Program Prioritas Nasional

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kisaran terdapat alokasi anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional 02 – Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru. Prioritas Nasional – 02 dilaksanakan melalui 1 (satu) program prioritas yaitu Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan yang terdiri dari 1 (satu) kegiatan prioritas yang tersebar di 13 satuan kerja dengan total target sebanyak 370 NUP bidang berupa tanah Barang Milik Negara dengan pagu (netto) mencapai Rp10.254.00,00. Adapun per 31 Desember 2025, rincian output tersebut telah tercapai sebanyak 370 NUP dengan realisasi anggaran sebesar Rp9.020.500,00. Adapun rincian Prioritas Nasional TA 2025 di lingkup Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kisaran disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

LAMPIRAN

VI. LAMPIRAN

- A. Laporan Realisasi Anggaran Komparatif dari MYINTRESS
- B. Neraca Komparatif dari MYINTRESS
- C. Laporan Operasional Komparatif dari MYINTRESS
- D. Laporan Perubahan Ekuitas Komparatif dari MYINTRESS
- E. Neraca Percobaan Akrual Saldo Awal dari MYINTRESS
- F. Neraca Percobaan Akrual dari MYINTRESS
- G. Neraca Percobaan Kas dari MYINTRESS
- H. Laporan Realisasi Pendapatan per Akun dari MYINTRESS
- I. Laporan Realisasi Belanja per Akun dari MYINTRESS
- J. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara
- K. Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca dari MYINTRESS
- L. Laporan Barang Intra Komptabel dari MYINTRESS
- M. Laporan Barang Ekstra Komptabel dari MYINTRESS
- N. Laporan Persediaan dari MYINTRESS
- O. Surat Hasil Rekonsiliasi
- P. Kertas Kerja Telaah
- Q. Memo Penyesuaian
- R. Informasi Kinerja Satuan Kerja

A. Laporan Realisasi Anggaran Komparatif dari MONSAKTI

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015
ESELON I : DITJEN KEKAYAAN NEGARA 09
SATUAN KERJA : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KISARAN 506081

Tgl Data : 19/02/26 7:46 AM
Tgl Cetak : 19/02/26 11:42 AM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	2,892,526,000	3,230,244,924	337,718,924	111.68	1,725,003,000	2,821,130,993	1,096,127,993	163.54
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	2,892,526,000	3,230,244,924	337,718,924	111.68	1,725,003,000	2,821,130,993	1,096,127,993	163.54
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	2,892,526,000	3,230,244,924	337,718,924	111.68	1,725,003,000	2,821,130,993	1,096,127,993	163.54
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	2,090,491,000	1,655,388,957	(435,102,043)	79.19	4,581,360,000	4,348,022,204	(233,337,796)	94.91
1. Belanja Pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Belanja Barang	2,010,491,000	1,587,785,207	(422,705,793)	78.97	2,050,832,000	1,855,088,913	(195,743,087)	90.46
3. Belanja Modal	80,000,000	67,603,750	(12,396,250)	84.50	2,530,528,000	2,492,933,291	(37,594,709)	98.51
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN KEUANGAN 015
ESELON I : DITJEN KEKAYAAN NEGARA 09
SATUAN KERJA : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KISARAN 506081

Tgl Data : 19/02/26 7:46 AM
Tgl Cetak : 19/02/26 11:42 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	2,090,491,000	1,655,388,957	(435,102,043)	79.19	4,581,360,000	4,348,022,204	(233,337,796)	94.91
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

KISARAN, 19 Februari 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

MELLY MAIESTA, S.E
NIP 197605311999032001

B. Neraca Komparatif dari MONSAKTI

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA

SATUAN KERJA : (506081) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG KISARAN

Tgl Data : 19/02/26 7:46 AM

Tgl Cetak : 19/02/26 11:43 AM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Penerimaan	763,760	0	763,760	0.00
Kas Lainnya dan Setara Kas	2,670,430	120,649,563	(117,979,133)	(97.79)
Persediaan	50,612,866	34,456,280	16,156,586	46.89
JUMLAH ASET LANCAR	54,047,056	155,105,843	(101,058,787)	(65.15)
ASET TETAP				
Tanah	7,669,363,000	7,669,363,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	4,172,918,256	4,145,627,557	27,290,699	0.66
Gedung dan Bangunan	9,029,679,863	9,029,679,863	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	9,969,500	9,969,500	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(4,823,581,960)	(4,371,145,602)	(452,436,358)	10.35
JUMLAH ASET TETAP	16,058,348,659	16,483,494,318	(425,145,659)	(2.58)
ASET LAINNYA				
Aset Lain-lain	119,088,751	40,808,570	78,280,181	191.82
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(119,088,751)	(40,808,570)	(78,280,181)	191.82
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	
JUMLAH ASET	16,112,395,715	16,638,600,161	(526,204,446)	(3.16)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	2,792,430	131,689,022	(128,896,592)	(97.88)
Pendapatan Diterima Dimuka	7,406,042	13,489,167	(6,083,125)	(45.10)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	10,198,472	145,178,189	(134,979,717)	(92.98)
JUMLAH KEWAJIBAN	10,198,472	145,178,189	(134,979,717)	(92.98)
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	16,102,197,243	16,493,421,972	(391,224,729)	(2.37)
JUMLAH EKUITAS	16,102,197,243	16,493,421,972	(391,224,729)	(2.37)
JUMLAH EKUITAS	16,102,197,243	16,493,421,972	(391,224,729)	(2.37)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	16,112,395,715	16,638,600,161	(526,204,446)	(3.16)

Keterangan :

FINAL

KISARAN, 19 Februari 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

MELLY MAIESTA, S.E
NIP 197605311999032001

C. Laporan Operasional Komparatif dari MONSAKTI

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA
SATUAN KERJA : (506081) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG KISARAN

Tgl Data : 19/02/26 7:46 AM
Tgl Cetak : 19/02/26 11:43 AM
Halaman : 1
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	3,221,214,809	2,804,053,742	417,161,067	14.877
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	3,221,214,809	2,804,053,742	417,161,067	14.877
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	3,221,214,809	2,804,053,742	417,161,067	14.877
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	78,300,684	73,873,375	4,427,309	5.993
Beban Barang dan Jasa	809,173,478	907,335,320	(98,161,842)	(10.819)
Beban Pemeliharaan	398,426,131	476,031,318	(77,605,187)	(16.303)
Beban Perjalanan Dinas	285,562,128	380,000,593	(94,438,465)	(24.852)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA
SATUAN KERJA : (506081) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG KISARAN

Tgl Data : 19/02/26 7:46 AM
Tgl Cetak : 19/02/26 11:43 AM
Halaman : 2
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	571,525,109	590,254,555	(18,729,446)	(3.173)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	2,142,987,530	2,427,495,161	(284,507,631)	(11.72)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	1,078,227,279	376,558,581	701,668,698	186.337
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	15,877,000	5,908,000	9,969,000	168.737
Pendapatan Pelepasan Aset	15,877,000	5,908,000	9,969,000	168.737
Beban Pelepasan Aset	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	15,877,000	5,908,000	9,969,000	168.737
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	1,094,104,279	382,466,581	711,637,698	186.065
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	1,094,104,279	382,466,581	711,637,698	186.065

Keterangan :
FINAL

KISARAN, 19 Februari 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

MELLY MAIESTA, S.E
NIP 197605311999032001

D. Laporan Perubahan Ekuitas Komparatif dari MyIntress

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA

SATUAN KERJA : (506081) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG KISARAN

Tgl Data : 19/02/26 12:44 AM

Tgl Cetak : 19/02/26 11:44 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	16,493,421,972	14,573,651,680	1,919,770,292	13.17
SURPLUS/DEFISIT-LO	1,094,104,279	382,466,581	711,637,698	186.07
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
LAIN-LAIN	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	(1,485,329,008)	1,537,303,711	(3,022,632,719)	(196.62)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(391,224,729)	1,919,770,292	(2,310,995,021)	(120.38)
EKUITAS AKHIR	16,102,197,243	16,493,421,972	(391,224,729)	(2.37)

Keterangan :

FINAL

KISARAN, 19 Februari 2026

Penanggung Jawab UAKPA

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

MELLY MAIESTA, S.E

NIP 197605311999032001

E. Neraca Percobaan Akrual Saldo Awal dari MYINTRESS

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 1 JANUARI 2025 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015

UNIT ORGANISASI : 09

WILAYAH/PROVINSI : 0700

SATUAN KERJA : 506081

KEMENTERIAN KEUANGAN

DITJEN KEKAYAAN NEGARA

SUMATERA UTARA

KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KISARAN

Tgl. Cetak 19/02/2026 11:45 AM
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	120,649,563	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	34,456,280	0
0.0	131111	Tanah	7,669,363,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	4,145,627,557	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	9,029,679,863	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	9,969,500	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	3,173,371,967
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	1,197,773,635
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	40,808,570	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	40,808,570
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	11,039,459
0.0	212192	Dana Pihak Ketiga	0	120,649,563
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	0	13,489,167
0.0	391111	Ekuitas	0	16,493,421,972
JUMLAH			21,050,554,333	21,050,554,333

F. Neraca Percobaan Akrual dari MYINTRESS

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA

SATUAN KERJA : (506081) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG KISARAN

Tgl Data : 19/02/26 7:46 AM

Tgl Cetak : 19/02/26 11:44 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111711	Kas di Bendahara Penerimaan	763,760	0
0.0	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	2,670,430	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	50,612,866	0
0.0	131111	Tanah	7,669,363,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	4,172,918,256	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	9,029,679,863	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	9,969,500	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	3,414,419,864
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	1,409,162,096
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	119,088,751	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	119,088,751
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	122,000
0.0	212192	Dana Pihak Ketiga	0	2,670,430
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	0	7,406,042
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	1,655,388,957
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	3,230,244,924	0
0.0	313211	Transfer Keluar	0	10,751,259
0.0	313221	Transfer Masuk	0	78,775,700
0.0	391111	Ekuitas	0	16,493,421,972
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	15,877,000
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	8,290,625
3.0	425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	500,000
3.0	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	0	2,499,667,663
3.0	425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	0	700,855,582
3.0	425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0	1,442,843
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	10,458,096
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	622,008,099	0
3.0	521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	29,557,079	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	19,126,000	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	84,270,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	32,540,200	0
3.0	521211	Beban Bahan	13,812,100	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	7,860,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	260,480,795	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	137,945,336	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	274,962,128	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	10,600,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	360,136,648	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA
WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA
SATUAN KERJA : (506081) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG KISARAN

Tgl Data : 19/02/26 7:46 AM
Tgl Cetak : 19/02/26 11:44 AM
Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	211,388,461	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	78,300,684	0
JUMLAH			26,428,298,880	26,428,298,880

Keterangan :
FINAL

KISARAN, 19 Februari 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

MELLY MAIESTA, S.E
NIP 197605311999032001

G. Neraca Percobaan Kas dari MYINTRESS

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN KEKAYAAN NEGARA

WILAYAH/PROVINSI : (0700) SUMATERA UTARA

SATUAN KERJA : (506081) KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG KISARAN

Tgl Data : 19/02/26 12:44 AM

Tgl Cetak : 19/02/26 11:44 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	1,655,388,957
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	3,230,244,924	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	15,877,000
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	2,207,500
3.0	425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	500,000
3.0	425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	0	2,498,903,903
3.0	425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	0	700,855,582
3.0	425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0	1,442,843
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	10,458,096
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	622,128,099	0
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	29,557,079	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	19,172,200	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	84,270,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	32,540,200	0
3.0	521211	Belanja Bahan	13,812,100	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	7,860,000	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	94,457,270	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	260,480,795	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	138,245,336	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	275,360,128	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	10,600,000	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	67,603,750	0
3.1	523121	Pengembalian Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	300,000
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	398,000
JUMLAH			4,886,331,881	4,886,331,881

Keterangan :

FINAL

KISARAN, 19 Februari 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARANMELLY MAIESTA, S.E
197605311999032001

H. Laporan Realisasi Pendapatan per Akun dari MYINTRESS

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 **KEMENTERIAN KEUANGAN**
ESELON I : 09 **DITJEN KEKAYAAN NEGARA**
WILAYAH/PROVINSI : 0700 **SUMATERA UTARA**
SATUAN KERJA : 506081 **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KISARAN**

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 19/02/26 11:46 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	15,877,000	0	15,877,000	0
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	2,000,000	2,207,500	0	2,207,500	110.38
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	2,000,000	18,084,500	0	18,084,500	904.22
4256	Pendapatan Jasa Lainnya					
425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	500,000	0	500,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4256	0	500,000	0	500,000	
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan					
425782	Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	1,732,995,000	2,498,903,903	0	2,498,903,903	144.2
425784	Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	1,155,330,000	700,855,582	0	700,855,582	60.66
425785	Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	2,201,000	1,442,843	0	1,442,843	65.55
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4257	2,890,526,000	3,201,202,328	0	3,201,202,328	110.75
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	10,458,096	0	10,458,096	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	10,458,096	0	10,458,096	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	2,892,526,000	3,230,244,924	0	3,230,244,924	111.68
	JUMLAH PENDAPATAN	2,892,526,000	3,230,244,924	0	3,230,244,924	111.68

I. Laporan Realisasi Belanja per Akun dari MYINTRESS

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI : 002
SATUAN KERJA : 506081
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN KEKAYAAN NEGARA
SUMATERA UTARA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KISARAN

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 19/02/26 11:47 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 19/2/26 8:33 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	646,694,000	643,994,000	622,128,099	0	622,128,099	96.6	21,865,901
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	14,592,000	30,590,000	29,557,079	0	29,557,079	96.62	1,032,921
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	9,600,000	21,000,000	19,172,200	0	19,172,200	91.3	1,827,800
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	114,600,000	111,560,000	84,270,000	0	84,270,000	75.54	27,290,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	4,800,000	38,802,000	32,540,200	0	32,540,200	83.86	6,261,800
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	790,286,000	845,946,000	787,667,578	0	787,667,578	93.11	58,278,422
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	41,601,000	38,740,000	13,812,100	0	13,812,100	35.65	24,927,900
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	10,200,000	10,200,000	7,860,000	0	7,860,000	77.06	2,340,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	51,801,000	48,940,000	21,672,100	0	21,672,100	44.28	27,267,900
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	107,247,000	107,587,000	94,457,270	0	94,457,270	87.8	13,129,730
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	107,247,000	107,587,000	94,457,270	0	94,457,270	87.8	13,129,730
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	338,343,000	338,343,000	260,480,795	0	260,480,795	76.99	77,862,205
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	295,940,000	289,940,000	138,245,336	300,000	137,945,336	47.58	151,994,664
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	634,283,000	628,283,000	398,726,131	300,000	398,426,131	63.42	229,856,869
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	360,704,000	356,622,000	275,360,128	398,000	274,962,128	77.1	81,659,872
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	41,280,000	23,113,000	10,600,000	0	10,600,000	45.86	12,513,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	401,984,000	379,735,000	285,960,128	398,000	285,562,128	75.2	94,172,872
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	1,985,601,000	2,010,491,000	1,588,483,207	698,000	1,587,785,207	78.97	422,705,793
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	80,000,000	80,000,000	67,603,750	0	67,603,750	84.5	12,396,250
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	80,000,000	80,000,000	67,603,750	0	67,603,750	84.5	12,396,250
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	80,000,000	80,000,000	67,603,750	0	67,603,750	84.5	12,396,250
	JUMLAH BELANJA	2,065,601,000	2,090,491,000	1,656,086,957	698,000	1,655,388,957	79.19	435,102,043

J. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara

**CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
PADA UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KISARAN
LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA BARANG
PERIODE SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2025**

I. PENDAHULUAN

- Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
- h. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah ;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012;
- j. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.06/2016;
- k. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016;
- l. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- n. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;

- 2 -

- o. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
 - p. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107/PMK.06/2019;
 - q. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
 - r. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 327/KM.06/2014 tentang Perubahan Kesembilan atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
 - s. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud sebagaimana terakhir diubah melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 81/KM.6/2018;
 - t. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KMK.06/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan BARang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat; u. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.
- Entitas Pelaporan
Entitas Pelaporan Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara (CaLBMN) ini adalah Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran.
 - Periode Laporan
Periode pelaporan untuk CaLBMN ini berlaku pada 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 (Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Tahunan Tahun Anggaran 2025).

II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, bahwa setiap Unit Penatausahaan Kuasa Pengguna Barang (UPKPB) wajib menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) periode Tahunan maupun Semesteran kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Barang Milik Negara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kisaran Semester II Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan beberapa kebijakan yang berkaitan dengan penatausahaan BMN, antara lain:

- 3 -

1. Penggolongan/kodefikasi berdasarkan kebijakan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 532/KM.06/2014 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
2. Penyajian BMN sesuai Bagan Akun Standar (BAS) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar. Aset Tetap dijabarkan dalam akun-akun yang disusun berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam aktifitas operasi. Selain itu, dengan diterapkannya penyusutan maka ada tambahan akun Akumulasi Penyusutan pada seluruh Aset Tetap kecuali pada Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan. Sedangkan Aset Tak Berwujud dilakukan amortisasi sebagaimana disajikan dalam akun Akumulasi Amortisasi;
3. Terkait dengan kebijakan kapitalisasi atas aset tetap. Laporan Barang Milik Negara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kisaran Tahunan TA 2025 ini telah disusun berdasarkan Lampiran VII pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
4. Adapun kebijakan rekonsiliasi berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana diubah dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
5. Kebijakan penyusutan BMN yang mulai dilaksanakan pada tahun anggaran 2013, berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KMK.06/2019 tentang Tabel masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat;
6. Kebijakan Amortisasi BMN mulai dilaksanakan pada tahun anggaran 2016, berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat.

III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Milik Negara Semester II Tahun 2025 UAKPB Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kisaran merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek BMN yang ditatausahakan dan dikelola oleh Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kisaran.

Nilai BMN gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan pada Laporan BMN Semester II Tahun 2025 ini adalah sebesar Rp21.016.704.986,00 (*Dua puluh satu miliar enam belas juta tujuh ratus empat ribu sembilan ratus delapan puluh enam rupiah*), yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp20.911.134.106,00 (*dua puluh miliar sembilan ratus sebelas juta seratus tiga puluh empat ribu seratus enam rupiah*) dan nilai mutasi yang terjadi selama semester II tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp105.570.880,00 (*seratus lima juta lima ratus tujuh puluh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah*).

- 4 -

Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari pembiayaan selain APBN periode tahun berjalan.

Laporan BMN ini disusun menggunakan sistem aplikasi sebagai alat bantu guna mempermudah dalam melakukan Penatausahaan BMN. Laporan BMN ini terdiri atas:

1. Neraca;
2. Laporan Barang Persediaan;
3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
4. Laporan Dalam Pengerjaan (KDP);
5. Laporan Aset Tak Berwujud;
6. Laporan Barang Bersejarah;
7. Laporan Kondisi Barang; *(untuk tahunan)*
8. Laporan Penyusutan;
9. Laporan Barang Hilang Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
10. Laporan Barang Rusak Berat Yang Telah Diusulkan Penghapusannya Kepada Pengelola Barang;
11. Laporan Barang Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS);
12. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;
13. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) internal antara UAKPB dengan UAKPA; dan
14. Laporan PNPB yang terkait dengan pengelolaan BMN.

IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA PERIODE SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2024 Saldo Awal

Nilai BMN per 1 Januari 2025 pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kisaran adalah sebesar Rp20.911.134.106,00 (*dua puluh miliar sembilan ratus sebelas juta seratus tiga puluh empat ribu seratus enam rupiah*) yang terdiri dari nilai BMN intrakomptabel (nilai BMN yang disajikan dalam Neraca) sebesar Rp20.895.448.490,00 (*Dua puluh miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus empat puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah*) dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp15.685.616,00 (*lima belas juta enam ratus delapan puluh lima ribu enam ratus enam belas rupiah*).

1. Ringkasan Mutasi Barang Milik Negara Semester II Tahun Anggaran 2025

Mutasi BMN per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

a. Barang Persediaan

Saldo Persediaan pada KPKNL Kisaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp50.612.866,00- (*Lima puluh juta enam ratus dua belas ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah*), jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp34.456.280,- (*Tiga puluh empat juta empat ratus lima puluh enam ribu dua ratus delapan puluh rupiah*)

dan total mutasi tambah persediaan selama periode laporan sebesar Rp.16.156.586,- (*Enam belas juta seratus lima puluh enam ribu lima ratus delapan puluh enam rupiah*).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian		Saldo Awal (Rp)	Mutasi (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
117111	Barang Konsumsi	34.456.280	16.156.586	50.612.866
JUMLAH		34.456.280	16.156.586	50.612.866

b. Tanah

Saldo Tanah pada KPKNL Kisaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp7,669,363,000,- (*Tujuh miliar enam ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal tanah seluas 3,072 m² dengan nilai sebesar Rp7,669,363,000,- (*Tujuh miliar enam ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu rupiah*), mutasi tambah seluas 0 m² dengan nilai sebesar Rp0- dan mutasi kurang seluas 0 m² dengan nilai sebesar Rp0,- (*nol rupiah*).

Dari jumlah/nilai tanah di atas, jumlah bidang tanah yang sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah 0 (*nol*) bidang dengan nilai sebesar Rp0,- (*nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 (*nol*) bidang dengan nilai sebesar Rp0,- (*nol rupiah*).

Rincian data tanah berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas (m ²)	Nilai (Rp)
Baik	3,072	7,669,363,000
Rusak Ringan	0	0
Rusak Berat	0	0

c. Peralatan dan Mesin

Saldo Peralatan dan Mesin pada KPKNL Kisaran per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp4,172,918,256,00- (*Empat miliar seratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus delapan belas ribu dua ratus lima puluh enam rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp4,145.627,557,00- (*Empat miliar seratus empat puluh lima juta enam ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp 146,379,450,00- (*Seratus empat puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp119,088,751,00- (*seratus sembilan belas juta delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah*).

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin per bidang barang adalah sebagai berikut:

1) Alat Bantu (3.01.03)

Saldo Alat Bantu pada KPKNL Kisaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp183,260,000,- (*Seratus delapan puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah *barang* sebesar 2 (*dua*) unit dengan nilai sebesar Rp183,260,000,- (*Seratus delapan puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah*), mutasi tambah jumlah barang 0 (*nol*) unit dengan nilai sebesar Rp0,- (*nol rupiah*), dan mutasi kurang jumlah barang 0 (*nol*) unit dengan nilai sebesar Rp0,- (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Bantu tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Pembelian (101)	Nihil	Nihil

Mutasi Kurang Alat Bantu tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Transfer Keluar	Nihil	Nihil
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan (401)	Nihil	Nihil

Dari jumlah Alat Bantu di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 (*nol*) unit dengan nilai sebesar Rp0,- (*nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 (*nol*) unit dengan nilai sebesar Rp0,- (*nol rupiah*).

Dari jumlah Alat Bantu di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas	Nilai (Rp)
Baik	1	181,500,000
Rusak Ringan	1	1,760,000
Rusak Berat	0	0

Kelompok barang Alat Bantu yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 (*nol*) unit/Rp0,-

2) Alat Angkutan Darat Bermotor (3.02.01)

Saldo Angkutan Darat Bermotor pada KPKNL Kisaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp1,594,560,579,- (*Satu miliar lima ratus sembilan puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah *barang* sebesar 10 (*sepuluh*) unit dengan nilai sebesar Rp 1,560,560,579,00- (*Satu miliar lima ratus enam puluh juta lima ratus enam puluh ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah*), mutasi tambah jumlah barang 2 (*dua*) unit dengan nilai sebesar Rp44.000.000,00,- (*Empat puluh empat juta rupiah*), dan mutasi kurang jumlah barang 0 (*nol unit* dengan nilai sebesar Rp0,- (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Angkutan Darat Bermotor tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Pembelian (101)	44.000.000,00	Nihil
Transfer Masuk (102)	Nihil	Nihil
Pembatalan Penghapusan (106)	Nihil	Nihil
Pengembangan Nilai Aset (202)	Nihil	Nihil

Mutasi Kurang Alat Angkutan Darat Bermotor tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Transfer Keluar	Nihil	Nihil
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan (401)	Nihil	Nihil

Dari jumlah Alat Angkutan Darat Bermotor di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 (*nol*) unit dengan nilai sebesar Rp0,- (*nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 (*nol*) unit dengan nilai sebesar Rp0,- (*nol rupiah*).

Dari jumlah Alat Angkutan Darat Bermotor di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas
Baik	10 unit
Rusak Ringan	2 unit
Rusak Berat	0 unit

Kelompok barang Alat Angkutan Darat Bermotor yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 (*nol*) unit/Rp0,-

3) Alat Angkutan Darat Tak Bermotor (3.02.02)

Saldo Angkutan Darat Tak Bermotor pada KPKNL Kisaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp 3,067,998,00,- (*Tiga juta enam puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah *barang* sebesar 2 (*dua*) unit dengan nilai sebesar Rp3,067,998,00,- (*Tiga juta enam puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah*), mutasi tambah jumlah barang 0 (*nol*) unit dengan nilai sebesar Rp 0,- dan mutasi kurang jumlah barang 0 (*nol*) unit dengan nilai sebesar Rp0,- (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Pembelian (101)	3,067,998,00	Nihil

Mutasi Kurang Alat Angkutan Darat Tak Bermotor tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Transfer Keluar	Nihil	Nihil
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan (401)	Nihil	Nihil

Dari jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 (*nol*) unit dengan nilai sebesar Rp0,- (*nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 (*nol*) unit dengan nilai sebesar Rp0,- (*nol rupiah*).

Dari jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas
Baik	1 unit
Rusak Ringan	0 unit
Rusak Berat	0 unit

Kelompok barang Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 (*nol*) unit/Rp0,-

4) Alat Ukur (3.03.03)

Saldo Alat Ukur pada KPKNL Kisaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp10,138,766,- (*Sepuluh juta seratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah *barang* sebesar 3 (*tiga*) unit dengan nilai sebesar Rp10,138,766,- (*Sepuluh juta seratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah*) , mutasi tambah jumlah barang 0 (*nol*) unit dengan nilai sebesar Rp0,00,- (*nol rupiah*), dan mutasi kurang jumlah barang 0 (*nol*) unit dengan nilai sebesar Rp0,- (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Ukur tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Pembelian (101)	Nihil	Nihil

Mutasi Kurang Alat Ukur tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Transfer Keluar	Nihil	Nihil
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan (401)	Nihil	Nihil

Dari jumlah Alat Ukur di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 (*nol*) unit dengan nilai sebesar Rp0,- (*nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 (*nol*) unit dengan nilai sebesar Rp0,- (*nol rupiah*).

Dari jumlah Alat Ukur di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas
Baik	3 unit
Rusak Ringan	0 unit
Rusak Berat	0 unit

Kelompok barang Alat Ukur yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 (*nol*) unit/Rp0,-

5) Alat Kantor (3.05.01)

Saldo Alat Kantor pada KPKNL Kisaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp 525,337.775,00- (*lima ratus dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah *barang* sebesar 108 (*seratus delapan*) unit dengan nilai sebesar Rp 525,337,175,00- (*lima ratus dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah*), mutasi tambah jumlah barang 0 (*nol*) unit dengan nilai sebesar Rp 0,- (*nol rupiah*), Mutasi kurang jumlah barang 1 (*satu*) unit dengan nilai sebesar Rp16.500.000,00,- (*Enam belas juta lima ratus ribu rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Kantor tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Pembelian (101)	Nihil	Nihil

Mutasi Kurang Alat Kantor tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Transfer Keluar	Nihil	Nihil
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan (401)	Rp.16.500.000,00	Nihil

Dari jumlah Alat Kantor di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 (*nol*) unit dengan nilai sebesar Rp0,- (*nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 1 (*satu*) unit dengan nilai sebesar Rp16.500.000,00,- (*enam belas juta lima ratus ribu rupiah*).

Dari jumlah Alat Kantor di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas
Baik	93 unit
Rusak Ringan	13 unit
Rusak Berat	1 unit

Kelompok barang Alat Kantor yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 1 (*satu*) unit/Rp16.500.000,00- (*enam belas juta lima ratus ribu rupiah*)

6) Alat Rumah Tangga (3.05.02)

Saldo Alat Rumah Tangga pada KPKNL Kisaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp 705.245.103,00- (*tujuh ratus lima juta dua ratus empat puluh lima ribu seratus tiga rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah *barang* sebesar 196 (*seratus sembilan puluh enam*) unit dengan nilai sebesar 721.030.353,00- (*tujuh ratus dua puluh satu juta tiga puluh ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah*), mutasi tambah jumlah barang 4 (*empat*) unit dengan nilai sebesar Rp2 3 . 6 0 3 . 7 5 0 , 0 0 ,- (*dua puluh tiga juta enam ratus tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah*), dan mutasi kurang jumlah barang 6 (*enam*) unit dengan nilai sebesar Rp 39.389.000,00- (*tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Rumah Tangga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Pembelian (101)	23.603.750,00	Nihil
Transfer Masuk (102)	Nihil	Nihil

Mutasi Kurang Alat Rumah Tangga tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan (401)	39.389.000	Nihil

Dari jumlah Alat Rumah Tangga di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 (*nol*) unit dengan nilai sebesar Rp0,- (*nol rupiah*), sudah proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 6 (*enam*) unit dengan nilai sebesar Rp39,389,000,00- (*tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah*).

Dari jumlah Alat Rumah Tangga di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas
Baik	166 unit
Rusak Ringan	22 unit
Rusak Berat	6 unit

Kelompok barang Alat Rumah Tangga yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 6 (*enam*) unit/Rp Rp39,389,000,00-(*tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah*).

7) Alat Studio (3.06.01)

Saldo Alat Studio pada KPKNL Kisaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp218,672,902,- (*dua ratus delapan belas juta enam ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus dua rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah *barang* sebesar 12 (*duabelas*) unit dengan nilai sebesar Rp218,672,902,- (*dua ratus delapan belas juta enam ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus dua rupiah*), mutasi tambah jumlah barang 0 (*nol*) unit dengan nilai sebesar Rp0,- (*nol rupiah*), dan mutasi kurang jumlah barang 0 (*nol*) unit dengan nilai sebesar Rp0,- (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Studio tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Pembelian (101)	Nihil	Nihil
Transfer Masuk (102)	Nihil	Nihil

Mutasi Kurang Alat Studio tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Transfer Keluar	Nihil	Nihil
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan (401)	Nihil	Nihil

Dari jumlah Alat Studio di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 (*nol*) unit dengan nilai sebesar Rp0,- (*nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 (*nol*) unit dengan nilai sebesar Rp0,- (*nol rupiah*).

Dari jumlah Alat Studio di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas
Baik	10 unit
Rusak Ringan	2 unit
Rusak Berat	0 unit

Kelompok barang Alat Studio yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 (*nol*) unit/Rp0,-

8) Alat Komunikasi (3.06.02)

Saldo Alat Komunikasi pada KPKNL Kisaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp 2,200,000,- (*dua juta dua ratus ribu rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah *barang* sebesar 2 (*dua*) unit dengan nilai sebesar Rp 2,200,000,- (*dua juta dua ratus ribu rupiah*), mutasi tambah jumlah barang 0 (*nol*) unit dengan nilai sebesar Rp0,- (*nol rupiah*), dan mutasi kurang jumlah barang 0 (*nol*) unit dengan nilai sebesar Rp0,- (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Alat Komunikasi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Pembelian (101)	Nihil	Nihil
Transfer Masuk (102)	Nihil	Nihil

Mutasi Kurang Alat Komunikasi tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Transfer Keluar	Nihil	Nihil
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan (401)	Nihil	Nihil

Dari jumlah Alat Komunikasi di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 (*nol*) unit dengan nilai sebesar Rp0,- (*nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 (*nol*) unit dengan nilai sebesar Rp0,- (*nol rupiah*).

Dari jumlah Alat Komunikasi di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas
Baik	2 unit
Rusak Ringan	0 unit
Rusak Berat	0 unit

Kelompok barang Alat Komunikasi yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 (*nol*) unit/Rp0,-

9) Komputer Unit (3.10.01)

Saldo Komputer Unit pada KPKNL Kisaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp 608.402.040,00,- (*enam ratus delapan juta empat ratus dua ribu empat puluh rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah *barang* sebesar 42 (*empat puluh dua*) unit dengan nilai sebesar Rp 592.826.091,00,- (*lima ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus dua puluh enam ribu sembilan puluh satu rupiah*), mutasi tambah jumlah barang 6 (*enam*) unit dengan nilai sebesar Rp78.775.700,00,- (*Tujuh puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus rupiah*), dan mutasi kurang jumlah barang 4 (*empat*) unit dengan nilai sebesar

Rp63,199,751,00- (*enam puluh tiga juta seratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah*).

Mutasi Tambah Komputer Unit tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Pembelian (101)	Nihil	Nihil
Transfer Masuk (102)	Rp78.775.700,00-	Nihil

Mutasi Kurang Komputer Unit meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Transfer Keluar		
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan (401)	Rp63,199.751,00	Nihil

Dari jumlah Komputer Unit di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 (*nol*) unit dengan nilai sebesar Rp0,- (*nol rupiah*), sudah proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 4 (*empat*) unit dengan nilai sebesar Rp63.199.751,00,- (*enam puluh tiga juta stujuh puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus empat rupiah*).

Dari jumlah Komputer Unit di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas
Baik	31 unit
Rusak Ringan	6 unit
Rusak Berat	4 unit

Kelompok barang Komputer Unit yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 5 (*empat*) unit/ Rp78.998.904,-

10) Peralatan Komputer (3.10.02)

Saldo Peralatan Komputer pada KPKNL Kisaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp 354.219.309,00,- (*tiga ratus lima puluh empat juta dua ratus sembilan belas ribu tiga ratus sembilan puluh empat*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal total jumlah *barang* sebesar 55 (*lima puluh lima*) unit dengan nilai sebesar Rp354.219.309,00,- (*tiga ratus lima puluh empat juta dua ratus sembilan belas ribu tiga ratus sembilan puluh empat*), mutasi tambah jumlah barang 0 (*nol*) unit dengan nilai sebesar Rp0,00- (*nol rupiah*), dan mutasi kurang jumlah barang 0 (*nol*) unit dengan nilai sebesar Rp0,00- (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Peralatan Komputer tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Pembelian (101)	Nihil	Nihil
Transfer Masuk (102)	Nihil	Nihil

Mutasi Kurang Peralatan Komputer tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Transfer Keluar	Nihil	Nihil
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan (401)	Nihil	Nihil

Dari jumlah Peralatan Komputer di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 (*nol*) unit dengan nilai sebesar Rp0,- (*nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 (*nol*) unit dengan nilai sebesar Rp0,- (*nol rupiah*).

Dari jumlah Peralatan Komputer di atas, berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas
Baik	40 unit
Rusak Ringan	15 unit
Rusak Berat	0 unit

Kelompok barang Peralatan Komputer yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 (*nol*) unit/Rp0,00 (*nol rupiah*).

11) Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada KPKNL Kisaran per31 Desember 2025 sebesar Rp3.414.419.864,00,- (tiga miliar empat ratus empat belas juta empat ratus sembilan belas ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) dengan rincian:

- **Alat Bantu**
Akumulasi penyusutan 2 (dua) unit peralatan dan mesin berupa alat bantu adalah sebesar Rp183.260.000,00,-(seratus delapan puluh tiga juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)
- **Alat Angkutan Darat Bermotor**
Akumulasi penyusutan 12 unit alat angkutan darat bermotor adalah sebesar Rp1.086304.439,00,- (satu miliar delapan puluh enam juta tiga ratus empat ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah)
- **Alat Angkutan Darat Tak Bermotor**
Akumulasi penyusutan 1 (satu) unit alat angkutan darat tak bermotor berupa kursi roda dan baggage trolley adalah sebesar Rp2.099.998,00-(dua juta sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah)

-15-

- **Alat Ukur**
Akumulasi penyusutan 3 unit alat ukur berupa wheel meter adalah sebesar Rp4.549.168,00,- (empat juta lima ratus empat puluh sembilan ribu seratus enam puluh delapan rupiah)
- **Alat Kantor**
Akumulasi penyusutan 95 (sembilan puluh lima) unit alat kantor adalah sebesar Rp476.067.905,00,- (empat ratus tujuh puluh enam juta enam puluh tujuh ribu sembilan ratus lima rupiah).
- **Alat Rumah Tangga**
Akumulasi penyusutan 194 (seratus sembilan puluh empat) unit alat rumah tangga adalah sebesar Rp595.104.642,00- (lima ratus sembilan puluh lima juta seratus empat ribu enam ratus empat puluh dua rupiah) yang terdiri atas Rp561.249.031,00 untuk barang intrakomptabel dan Rp594.000,00 untuk barang ekstrakomptabel.
- **Alat Studio**
Akumulasi penyusutan 12 (dua belas) unit alat studio adalah sebesar Rp195.480.428,00- (seratus sembilan puluh lima juta empat ratus delapan puluh ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah).
- **Alat Komunikasi**
Akumulasi penyusutan 2 (dua) unit alat komunikasi adalah sebesar Rp2.200.000,,00- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- **Komputer Unit**
Akumulasi penyusutan 44 (empat puluh empat) unit alat komputer unit adalah sebesar Rp533.107.765,00 (Lima ratus tiga puluh tiga juta seratus tujuh ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah).
- **Peralatan Komputer**
Akumulasi penyusutan 49 (empat puluh sembilan) unit peralatan komputer adalah sebesar Rp306.246.521,00 (tiga ratus enam juta dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus dua puluh satu rupiah).

d. Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan pada KPKNL Kisaran per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 9,029,679,863,00 (sembilan miliar dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp 9,029,679,863,00 (sembilan miliar dua puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah), mutasi tambah sebesar Rp0,00,- (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp0 (*nol rupiah*).

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per bidang barang adalah sebagai berikut:

- 1) Bangunan Gedung Tempat Kerja (4.01.01)

Saldo Bangunan Gedung Tempat Kerja pada KPKNL Kisaran per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 6,895,411,960 (*enam miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus sebelas ribu sembilan ratus enam puluh rupiah*).

-16 -

Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 1 (satu) unit dengan nilai sebesar Rp 6,895,411,960 (*enam miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus sebelas ribu sembilan ratus enam puluh rupiah*).

mutasi tambah sejumlah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp0,- (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sejumlah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp 0 (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Bangunan Gedung Tempat Kerja tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
102 Transfer Masuk	Nihil	Nihil
113 Penyelesaian Pembangunan Langsung	Nihil	Nihil
202 Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	Nihil	Nihil
208 Pengembangan Melalui KDP	Nihil	Nihil

Mutasi Kurang Bangunan Gedung Tempat Kerja tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
305 Koreksi Pencatatan	Nihil	Nihil
401 Penghentian Aset Dari Penggunaan	Nihil	Nihil

Dari jumlah Bangunan Gedung Tempat Kerja di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp0,- (*nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan adalah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp0,- (*nol rupiah*).

Dari jumlah Bangunan Gedung Tempat Kerja di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas
Baik	1 unit
Rusak Ringan	0 unit
Rusak Berat	0 unit

Kelompok barang Bangunan Gedung Tempat Kerja yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 (*nol*) unit/Rp0,-

- 2) Bangunan Gedung Tempat Tinggal (4.01.02)
- Saldo Bangunan Gedung Tempat Tinggal pada KPKNL Kisaran per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1,802,169,903,00 (*satu miliar delapan ratus dua juta seratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga rupiah*).

Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 7 (tujuh) unit dengan nilai sebesar Rp1,802,169,903,00 (*satu miliar delapan ratus dua juta seratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga rupiah*), mutasi tambah sejumlah 0,00 (nol) unit dan mutasi kurang sejumlah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp0,- (*nol rupiah*).

- 17 -

Mutasi Tambah Bangunan Gedung Tempat Tinggal tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
102 Transfer Masuk	Nihil	Nihil
113 Penyelesaian Pembangunan Langsung	Nihil	Nihil
202 Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	Nihil	Nihil
208 Pengembangan Melalui KDP	Nihil	Nihil

Mutasi Kurang Bangunan Gedung Tempat Tinggal tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
305 Koreksi Pencatatan	Nihil	Nihil
401 Penghentian Aset Dari Penggunaan	Nihil	Nihil

Dari jumlah Bangunan Gedung Tempat Tinggal di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp0,- (*nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan adalah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp0,- (*nol rupiah*).

Dari jumlah Bangunan Gedung Tempat Tinggal di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas
Baik	7 unit
Rusak Ringan	0 unit
Rusak Berat	0 unit

Kelompok barang Bangunan Gedung Tempat Tinggal yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 (*nol*) unit/Rp0,-

3) Tugu/Tanda Batas (4.04.01)

Saldo Tugu/Tanda Batas pada KPKNL Kisaran per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 212,177,000 (dua ratus dua belas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 1 (satu) unit dengan nilai sebesar Rp 212,177,000 (dua ratus dua belas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)), mutasi tambah sejumlah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp0,- (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sejumlah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp0,- (*nol rupiah*).

Mutasi Tambah Tugu/Tanda Batas tersebut meliputi :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
102 Transfer Masuk	Nihil	Nihil
113 Penyelesaian Pembangunan Langsung	Nihil	Nihil
202 Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	Nihil	Nihil
208 Pengembangan Melalui KDP	Nihil	Nihil

-18-

Mutasi Kurang Tugu/Tanda Batas tersebut meliputi:

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
305 Koreksi Pencatatan	Nihil	Nihil
401 Penghentian Aset Dari Penggunaan	Nihil	Nihil

Dari jumlah Tugu/Tanda Batas di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp0,- (*nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan adalah 0 (nol) unit dengan nilai sebesar Rp0,- (*nol rupiah*).

Dari jumlah Tugu/Tanda Batas di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas
Baik	1 unit
Rusak Ringan	0 unit
Rusak Berat	0 unit

Kelompok barang Tugu/Tanda Batas yang statusnya dihentikan dari penggunaan operasional pemerintah adalah 0 (*nol*) unit/Rp0,-

- 4) Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan.
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan pada KPKNL Kisaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.409.162.096,00,- (satu miliar empat ratus sembilan juta seratus enam puluh dua ribu sembilan puluh enam rupiah).

e. Aset Tetap Lainnya

Saldo Aset Tetap Lainnya pada KPKNL Kisaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp 9,969,500 (sembilan juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp 9,969,500 (sembilan juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), mutasi tambah sebesar Rp0,-(*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp0,- (*nol rupiah*).

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya per bidang barang adalah sebagai berikut:

- 1) Bahan Perpustakaan Tercetak
Saldo Bahan Perpustakaan Tercetak pada KPKNL Kisaran per 31 Desember

2025 adalah sebesar Rp 9,969,500 (sembilan juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sejumlah 52 (*lima puluh dua*) unit dengan nilai sebesar Rp 9,969,500 (sembilan juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) mutasi tambah sejumlah 0 (nol) *unit* dengan nilai sebesar Rp0,- (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sejumlah 0 (nol) *unit* dengan nilai sebesar Rp0,- (*nol rupiah*).

Dari jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak di atas, yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga adalah sejumlah 0 (nol) *unit* dengan nilai sebesar Rp0,- (*nol rupiah*), sedang dalam proses penghapusan/pemindahtanganan adalah 0 (nol) *unit* dengan nilai sebesar Rp0,- (*nol rupiah*).

Dari jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak di atas berdasarkan status kondisinya adalah sebagai berikut:

Uraian Kondisi	Kuantitas
Baik	52 unit
Rusak Ringan	0 unit
Rusak Berat	0 unit

2) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya.

Akumulasi penyusutan Aset Tetap Lainnya pada KPKNL Kisaran per 31 Desember 2025 adalah 0 unit sebesar Rp0,- (*nol rupiah*).

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan pada KPKNL Kisaran per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,- (*nol*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp0,- (*nol rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp0- (*nol rupiah*), dan mutasi kurang sebesar Rp0 (*nol rupiah*).

2. Barang Milik Negara pada Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL Kisaran) per 31 Desember 2025.

a. BMN per akun neraca

Nilai BMN Gabungan pada Laporan Barang Milik Negara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kisaran periode semester II Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp21.016.704.896,00 (Dua puluh satu miliar enam belas juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah). Nilai BMN dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca yaitu: Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Aset Lainnya. Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Lancar						
1	Persediaan	50.612.866	100%			50.612.866	100%
	Sub Jumlah (1)	50.612.866	100%			50.612.866	100%
II	Aset Tetap						
1	Tanah	7.669.363.000	100%			7.669.363.000	100%
2	Peralatan dan Mesin	4.172.918.256	99.63%	15.685.616	0.37%	4.188.603.872	100%
3	Gadung dan	9.029.679.863	100%	0	0	9.029.679.863	100%
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	9.969.500	100%	0	0	9.969.500	100%
6	KDP	0	0	0	0	0	0
	Sub Jumlah (2)	20.881.930.619		15.685.616		20.897.616.235	
III	Aset Lainnya						
1	Kemitraan dengan pihak ketiga	-	-	-	-	-	-
2	Aset Tak Berwujud	-	-	-	-	-	-
3	Aset yang dihentikan dari penggunaan operasional Pemerintah	119.088.751	-	-		119.088.751	-
	Sub Jumlah (3)	119.088.751	-	-	-	119.088.751	-
Total		21.001.019.370		15.685.616		21.107.543.816	

Rincian nilai Akumulasi Penyusutan BMN pada Laporan Barang Milik Negara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kisaran per 31 Desember 2025 per perkiraan Neraca adalah sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Intrakomptabel		Ekstrakomptabel		Gabungan	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%
I	Aset Tetap						
1	Peralatan dan Mesin						
2	Gedung dan Bangunan						
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan						
	Sub Jumlah (I)						
II.	Aset Lainnya						
1.	Kemitraan dengan pihak ketiga						
2.	Aset yang dihentikan dari penggunaan operasional Pemerintah						
	Sub Jumlah (II)						
Total		4.537.253.992	99,78	14.059.604	0,22%	4.543.729.738	100%

b. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan

Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam laporan barang dan laporan keuangan pada Laporan Barang Milik Negara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kisaran Semester II Tahunan TA Tahun 2025 per akun neraca adalah sebagai berikut :

No	Uraian Neraca	Laporan Barang	Laporan Keuangan	Selisih
1	Persediaan	50.612.866	50.612.866	0
2	Tanah	7.669.363.000	7.669.363.000	0
3	Peralatan dan Mesin	4.172.918.256	4.172.918.256	0
4	Gedung dan Bangunan	9.029.679.863	9.029.679.863	0
5	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
6	Aset Tetap Lainnya	9.969.500	9.969.500	0
7	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(3.414.419.864)	(3.414.419.864)	0
8	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.409.162.096)	(1.409.162.096)	0
9	Aset lain-lain	119.088.751	119.088.75	0
10	Akumulasi Penyusutan aset lain	(119.088.751)	(119.088.751)	0
Total				0

*) Aset lain-lain pada laporan barang adalah nilai BMN yang dihentikan penggunaannya dari operasional pemerintah

Berdasarkan rekapitulasi data perbandingan nilai BMN tersebut di atas, **tidak terdapat selisih** antara penyajian nilai BMN antara laporan barang dan laporan keuangan.

V. INFORMASI BMN LAINNYA

1. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) selama 5 (lima) periode laporan terakhir, dapat disajikan sebagai berikut:

No	Periode Laporan	Nilai BMN	Perkembangan	
			Rupiah	Persen
1	Tahunan TA 2021	18.562.530.037	3.309.637.347	21.7%
2	Tahunan TA 2022	18.340.525.132	-222.004.905	(1.2%)
3	Tahunan TA 2023	18.658.466.368	317.941.236	1.7%
4	Tahunan TA 2024	21.091.858.200	2.433.391.832	11,5%
5	Tahunan TA 2025	21.016.704.986	75.153.214	(0.3%)

2. Informasi Pengelolaan BMN

a. Penetapan Status Penggunaan BMN

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaanya pada KPKNL Kisaran per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Sudah Ditetapkan Status Penggunaan (Rp)	Belum Ditetapkan Status Penggunaan (Rp)
1	Tanah	7.669.363.000	0
2	Peralatan dan Mesin	4.188.603.872	0
3	Gedung & Bangunan	9.029.679.863	0
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0
5	Aset tetap lainnya	9.969.500	0
6.	Aset Tetap yang tidak digunakan lagi dalam operasi pemerintahan	119.088.751	
Jumlah		21.016.704.986	0

b. Pengelolaan BMN

No	Uraian	Penggu- naan	Peman- faatan	Pemindah- tanganan	Pengha- pusan	Jumlah
1	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengguna Barang *)	-	-	-	-	-
2	Dalam proses pengajuan permohonan ke Pengelola Barang	-	-	-	-	-

3	Dalam proses Pengelola Barang	-	-	-	-	-
4	Selesai di Pengelola Barang	-	-	-	-	-
	a.Dikembalikan	-	-	-	-	-
	b.Ditolak	-	-	-	-	-
	c.Disetujui	2	1	-	1	4
5	Dalam proses tindak lanjut Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang	-	-	-	-	-
6	Telah diterbitkan Keputusan dari Pengguna Barang	1	1	-	-	
7	Tindak lanjut oleh Kuasa Pengguna Barang					
8	Selesai serah terima					

Keterangan: *) hanya diperlakukan untuk proses pengelolaan di tingkat UAKPB, UAPPB-W, dan UAPPB-E1

c. Pengelolaan BMN Idle

No	Uraian	Jumlah
1	Jumlah BMN yang teridentifikasi sebagai BMN Idle	0
2	Ditetapkan sebagai BMN Idle oleh Pengelola	0
3	Pemberitahuan bukan sebagai BMN Idle oleh Pengelola	0
4	Telah diterbitkan Keputusan Penghapusan dari Pengguna	0
5	Selesai serah terima kepada Pengelola	0

d. Penerimaan Negara yang Berasal dari Pengelolaan BMN

Pemasukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai hasil dari pengelolaan BMN yang ditatausahakan oleh KPKNL Kisaran pada periode Semester II/Tahunan Tahun 2025 adalah sebesar Rp18.084.500,00 (delapan belas juta delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah) dengan rincian:

- Sewa tanah bangunan kantor pemerintah peruntukan cafe (18m2) = Rp2.207.500,00,- (dua juta dua ratus tujuh ribu lima ratus rupiah)
- Penjualan Peralatan dan Mesin = Rp. 15.877.000,00- (Lima belas juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

3. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN

Belum terdapat permasalahan-permasalahan yang perlu disampaikan dalam terkait dengan pelaksanaan Penatausahaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).

4. Langkah-Langkah Strategis Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah

Sebagaimana dinyatakan pada poin nomor 3 diatas maka dalam rangka penyelesaian masalah terkait pelaksanaan Penatausahaan BMN pada Satker, Langkah-langkah startegis yang perlu dilakukan sampai saat ini belum ada

*CATATAAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
UAKPB KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA
DAN LELANG KISARAN SEMESTER II 2025*

Penanggungjawab Unit Akuntansi Kuasa
Pengguna Barang (UAKPB) Kantor
Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
(KPKNL) Kisaran
Kepala Kantor/Kuasa Pengguna Barang



Ditandatangani secara elektronik

Melly Maiesta
NIP 197605311999032001

K. Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca dari MYINTRESS

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
TAHUN ANGGARAN 2025

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 506081 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KISARAN

Tgl.Data : 19/02/26 12:44 AM
Tgl.Cetak : 19/02/26 11:53 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_satker_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	50,612,866
131111	Tanah	7,669,363,000
132111	Peralatan dan Mesin	4,172,918,256
133111	Gedung dan Bangunan	9,029,679,863
135121	Aset Tetap Lainnya	9,969,500
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(3,414,419,864)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1,409,162,096)
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	119,088,751
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(119,088,751)
J U M L A H		16,108,961,525

L. Laporan Barang Intra Komptabel dari MYINTRESS

LAPORAN BARANG PENGGUNA
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 506081 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KISARAN

Tgl Data : 19/02/26 12:44 AM
Tgl Cetak : 19/02/26 11:54 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_intra_kel_satker_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2025		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
131111	Tanah		3,072	7,669,363,000	0	0	0	0	3,072	7,669,363,000
20101	TANAH PERSIL	-	3,072	7,669,363,000	0	0	0	0	3,072	7,669,363,000
132111	Peralatan dan Mesin		410	4,145,627,557	12	146,379,450	11	119,088,751	411	4,172,918,256
30103	ALAT BANTU	-	2	183,260,000	0	0	0	0	2	183,260,000
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	10	1,550,560,579	2	44,000,000	0	0	12	1,594,560,579
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	-	1	2,099,998	0	0	0	0	1	2,099,998
30303	ALAT UKUR	-	3	10,138,766	0	0	0	0	3	10,138,766
30501	ALAT KANTOR	-	96	513,457,175	0	0	1	16,500,000	95	496,957,175
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	193	720,058,353	4	23,603,750	6	39,389,000	191	704,273,103
30601	ALAT STUDIO	-	12	218,672,902	0	0	0	0	12	218,672,902
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	2	2,200,000	0	0	0	0	2	2,200,000
31001	KOMPUTER UNIT	-	42	592,826,091	6	78,775,700	4	63,199,751	44	608,402,040
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	49	352,353,693	0	0	0	0	49	352,353,693
133111	Gedung dan Bangunan		12	9,029,679,863	0	0	0	0	12	9,029,679,863
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	-	4	7,015,332,960	0	0	0	0	4	7,015,332,960
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	-	7	1,802,169,903	0	0	0	0	7	1,802,169,903
40401	TUGU/TANDA BATAS	-	1	212,177,000	0	0	0	0	1	212,177,000
135121	Aset Tetap Lainnya		52	9,969,500	0	0	0	0	52	9,969,500
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	-	52	9,969,500	0	0	0	0	52	9,969,500
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan		2	40,808,570	11	119,088,751	2	40,808,570	11	119,088,751
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	2	40,808,570	0	0	2	40,808,570	0	0
30501	ALAT KANTOR	-	0	0	1	16,500,000	0	0	1	16,500,000
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	0	0	6	39,389,000	0	0	6	39,389,000
31001	KOMPUTER UNIT	-	0	0	4	63,199,751	0	0	4	63,199,751
TOTAL				20,895,448,490		265,468,201		159,897,321		21,001,019,370

M. Laporan Barang Ekstra Komptabel dari MYINTRESS

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 506081 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KISARAN

Tgl Data : 19/02/26 12:44 AM
Tgl Cetak : 19/02/26 11:54 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_ekstra_kel_satker_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED							
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN					NILAI BUKU
					SALDO AWAL		MUTASI PENYUSUTAN		TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7		8=6+7	9=5-8	
132111	Peralatan dan Mesin		22	15,685,616	0	0	0	0	22	15,685,616
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	-	1	968,000	0	0	0	0	1	968,000
30501	ALAT KANTOR	-	12	11,880,000	0	0	0	0	12	11,880,000
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	3	972,000	0	0	0	0	3	972,000
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	6	1,865,616	0	0	0	0	6	1,865,616
TOTAL				15,685,616		0		0		15,685,616

N. Laporan Persediaan dari MYINTRESS

LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED

UAPB : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
UAKPB : 506081 KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KISARAN

Tgl Data : 19/02/26 12:44 AM
Tanggal : 19/02/26 11:55 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_sedia_satker_poc

Kode	Uraian	Jumlah
117111	Barang Konsumsi	
1010301001	Alat Tulis	4,336,205
1010301002	Tinta Tulis, Tinta Stempel	239,760
1010301003	Penjepit Kertas	593,200
1010301004	Penghapus/Korektor	266,400
1010301005	Buku Tulis	25,000
1010301006	Ordner Dan Map	2,021,000
1010301007	Penggaris	26,640
1010301008	Cutter (Alat Tulis Kantor)	336,480
1010301010	Alat Perekat	2,076,010
1010301012	Staples	734,400
1010301013	Isi Staples	2,774,850
1010301014	Barang Cetak	96,000
1010301999	Alat Tulis Kantor Lainnya	2,458,771
1010302001	Kertas HVS	2,821,950
1010302002	Berbagai Kertas	1,344,078
1010302003	Kertas Cover	3,200,250
1010302004	Amplop	3,093,030
1010302999	Kertas Dan Cover Lainnya	316,350
1010304004	Tinta/Toner Printer	21,831,100
1010304010	Mouse	700,000
1010304011	CD/DVD	115,000
1010306001	Kabel Listrik	275,000
1010306010	Batu Baterai	626,392
1010309001	Meterai	70,000
1010309003	Stempel	70,000
1010310999	Alat Penunjang Kegiatan Kantor Lainnya	165,000
Jumlah Barang Konsumsi		50,612,866
TOTAL		50,612,866

Keterangan :
1. Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi rusak.
2. Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi usang.

O. Surat Hasil Rekonsiliasi



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
KPPN TANJUNG BALAI ASAHAN

HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN

PADA SATKER 506081 - KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KISARAN

SAMPAI DENGAN PERIODE 2025-12

Tgl Cetak : 05/02/26 9:49

Kode Lap : shr_kppn_poc

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	2,090,491,000	2,090,491,000	0
2	Belanja	1,656,086,957	1,656,086,957	0
3	Pengembalian Belanja	-698,000	-698,000	0
4	Estimasi Pendapatan	2,892,526,000	2,892,526,000	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	3,230,244,924	3,230,244,924	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Catatan Satker:

Catatan KPPN:

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 23 Januari 2026



P. Kertas Kerja Telaah

KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
TRIWULAN III TAHUN 2025

Kode dan Nama UAKPA : (506081) KPKNL KISARAN
 Kode dan Nama UAPPAW : (07) SUMATERA UTARA
 Kode dan Nama Eselon-1 : (09) DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
 Kode dan Nama K/L : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN

Objek Penelaahan		Kondisi LK	Seharusnya
Beri tanda centang (✓) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A			
Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran			
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN			
	Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok	Ada	Tidak
1	Pernyataan Tanggung Jawab	✓	Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE	✓	Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	✓	Ada
	Laporan Keuangan Tambahan	Ada	Tidak
1	Neraca Percobaan Akrua Saldo Awal	✓	Ada
2	Neraca Percobaan Akrua	✓	Ada
3	Neraca Percobaan Kas	✓	Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	✓	Ada
KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI			
	Kesesuaian Saldo	Sama	Tidak
1.	Semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	✓	Sama
Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.			
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI			
	Persamaan Dasar Akuntansi	Sama	Tidak
1	Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	✓	Sama
2	Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	✓	Sama
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	✓	Sama
PENGECHEKAN PADA MONSAKTI			
	To Do List	Ya	Tidak
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan		✓
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat	✓	
3	Terdapat Persediaan Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		✓
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		✓
5	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada,		✓
6	Terdapat Aset Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		✓
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		✓
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		✓
9	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada,		✓
10	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan		✓
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		✓
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		✓
Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah			
	Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)	Ada	Tidak
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		✓
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		✓
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		✓
a.	Pagu/DIPA		✓
b.	Estimasi PNBP		✓

	c. Belanja		√	Tidak
	d. Pengembangan Belanja		√	Tidak
	e. Pendapatan		√	Tidak
	f. Pengembangan Belanja		√	Tidak
	g. Kas BLU		√	Tidak
	h. Kas di Bendahara Pengeluaran		√	Tidak
	i. Kas Hibah		√	Tidak
	j. Pengesahan Hibah Langsung		√	Tidak
	Rekon Internal	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Selisih Rekon Internal		√	Tidak
	Daftar MONSAKTI	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak		√	Ada/Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregister)		√	Ada/Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		√	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		√	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		√	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		√	Tidak
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL				
	Pengecekan Saldo Neraca Percobaan	Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrual		√	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		√	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		√	Tidak
	Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	√		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	√		Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)	√		Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	√		Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)	√		Ya
	Akun-Akun yang tidak boleh ada	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		√	Ada/Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)		√	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka		√	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		√	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		√	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar			Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		√	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		√	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		√	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		√	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban		√	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		√	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Materai dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)		√	Tidak
	Jika Bukan Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"		√	Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)		√	Tidak

3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)		√	Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		√	Tidak
	Terkait Satker BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)			Ada/Tidak
	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah			
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada			Tidak
	Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial		√	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		√	Tidak
	Hibah Langsung	Ada	Tidak	Seharusnya
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		√	Ada/Tidak
1	Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh			Ada/Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)			Ada/Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133- Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)			Ya
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?			Ya
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?			Ya
	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya			Ada/Tidak
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang			Ya
	Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal			
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI			
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)			
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada		√	Tidak
	Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?		√	Ya/Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?			Ya/Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual			Ya
	Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		√	Ya/Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun			Ya/Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam Calk			
	Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah		√	Ya/Tidak
PENGECEKAN NERACA				
	Pengecekan Pos-pos Neraca	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	√		Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar	√		Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	√		Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	√		Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan	√		Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		√	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?	√		Ya
8	Terdapat saldo bernilai desimal		√	Tidak

PENGECHEKAN LAPORAN OPERASIONAL				
	Pengecekan Pos-pos LO	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		√	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) ,		√	Tidak
3	Terdapat kodefikasi atau uraian akun null		√	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	√		Ya
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?		√	Ya/Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	√		Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
PENGECHEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS				
	Pengecekan Pos-pos LPE	Ya	Tidak	Seharusnya
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	√		Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya		√	Ya/Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek		√	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
	Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?	√		Ya
	Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal			
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar	√		Ya
PENGECHEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)				
	Pengecekan Pos-pos LRA/B/P	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat saldo negatif di LRAB		√	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		√	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		√	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		√	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti		√	Ya/Tidak
7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah		√	Tidak
TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN				
	Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :		√	Ya/Tidak
	- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)		√	Ya/Tidak
	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)		√	Ya/Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang		√	Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :		√	Ya/Tidak
	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		√	Ya/Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :	√		Ya/Tidak
	- Beban Persediaan (di LO)	√		Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :	√		Ya/Tidak
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)	√		Ya/Tidak
	- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	√		Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrua?	√		Ya/Tidak
	Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?	√		Ya
	Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?		√	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas			Ya
2	Apakah ada Beban Bansos ?		√	Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas			Ya
	Pengecekan Jurnal Manual Akrua pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrua	√		Ya/Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)	√		Ya/Tidak

	- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrua			Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrua		√	Ya/Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)		√	Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrua			Ya/Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrua	√		Ya/Tidak

TELAAH LK BLU

	LPSAL BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?			Ya
2	Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?			Tidak
3	Apakah formula perhitungan SAL pada LPSAL telah sesuai?			Ya
4	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX,			Ya
5	Apakah Nilai SiLPA/SiKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA			Ya
6	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX,			Ya
	LAK BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan			Ya
2	Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?			Ya
3	Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca			Ya
4	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca			Ya
5	Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca			Ya
6	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca			Ya
7	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan			Ya

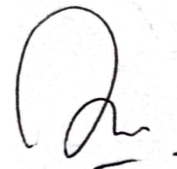
LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

Mengetahui
Penyusun LKKL,



NIP 199908242022012001

Kisaran, 11 Februari 2026
Penelaah,



NIP 198304272006021002

Q.Memo Penyesuaian

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : KEMENTERIAN KEUANGAN
 Negara/Lembaga :
 Eselon I : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
 Wilayah : KANWIL DJKN SUMATERA UTARA
 Satuan Kerja : KPKNL KISARAN
 No Dokumen : 002/12/2025
 Tanggal : 31 Desember 2025
 Tahun Anggaran : 2025
 Keterangan : Jurnal Penyesuaian Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan 31 Desember 2025

Kategori Jurnal Penyesuaian

	Pendapatan Diterima di Muka		Koreksi Antar Beban
	Pendapatan Yang Masih Harus diterima		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
	Belanja Dibayar di Muka		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
	Belanja yang Masih Harus Dibayar		Pembentukan Piutang Jangka Panjang
	Penyisihan Piutang		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
	Penghapusan Piutang		Transfer Masuk
	Penyusutan Aset		Transfer Keluar
	Kas di Bendahara Penerimaan		Reklasifikasi Neraca
	Kas di Bendahara Pengeluaran		Koreksi
	Persediaan	v	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	212192	Dana Pihak Ketiga	763.760	
	K	111825	Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan		763.760

Diketahui Oleh:
Kepala Subbagian Umum



Ditandatangani secara Elektronik
Muhammad Iqbal
NIP 198304272006021002

Disetujui Oleh:
Kuasa Pengguna Anggaran



Ditandatangani secara Elektronik
Melly Maiesta
NIP 197605311999032001

Direkam Oleh:
Operator



Ditandatangani secara Elektronik
Adelia T.R. Hutapea
NIP 199908242022012001



FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : KEMENTERIAN KEUANGAN
 Negara/Lembaga : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
 Eselon I : KANWIL DJKN SUMATERA UTARA
 Wilayah : KPKNL KISARAN
 Satuan Kerja : 001/12/2025
 No Dokumen : 31 Desember 2025
 Tanggal : 2025
 Tahun Anggaran : Jurnal Penyesuaian Kas di Bendahara Penerimaan 31 Desember 2025
 Keterangan :

Kategori Jurnal Penyesuaian

	Pendapatan Diterima di Muka		Koreksi Antar Beban
	Pendapatan Yang Masih Harus diterima		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
	Belanja Dibayar di Muka		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
	Belanja yang Masih Harus Dibayar		Pembentukan Piutang Jangka Panjang
	Penyisihan Piutang		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
	Penghapusan Piutang		Transfer Masuk
	Penyusutan Aset		Transfer Keluar
V	Kas di Bendahara Penerimaan		Reklasifikasi Neraca
	Kas di Bendahara Pengeluaran		Koreksi
	Persediaan		Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	111711	Kas di Bendahara Penerimaan	763.760	
	K	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka		763.760

Diketahui Oleh:
Kepala Subbagian Umum



Ditandatangani secara Elektronik
Muhammad Iqbal
NIP 198304272006021002

Disetujui Oleh:
Kuasa Pengguna Anggaran



Ditandatangani secara Elektronik
Melly Maiesta
NIP 197605311999032001

Direkam Oleh:
Operator



Ditandatangani secara Elektronik
Adelia T.R. Hutapea
NIP 199908242022012001



FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : KEMENTERIAN KEUANGAN
 Negara/Lembaga : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
 Eselon I : KANWIL DJKN SUMATERA UTARA
 Wilayah : KPKNL KISARAN
 Satuan Kerja : 003/12/2025
 No Dokumen : 31 Desember 2025
 Tanggal : 2025
 Tahun Anggaran : Jurnal Penyesuaian Pendapatan Diterima Di Muka 31 Desember 2025
 Keterangan :

Kategori Jurnal Penyesuaian

	Pendapatan Diterima di Muka		Koreksi Antar Beban
	Pendapatan Yang Masih Harus diterima		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
	Belanja Dibayar di Muka		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
V	Belanja yang Masih Harus Dibayar		Pembentukan Piutang Jangka Panjang
	Penyisihan Piutang		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
	Penghapusan Piutang		Transfer Masuk
	Penyusutan Aset		Transfer Keluar
	Kas di Bendahara Penerimaan		Reklasifikasi Neraca
	Kas di Bendahara Pengeluaran		Koreksi
	Persediaan		Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	122.000	
	K	212112	Belanja Barang yang Masih Hams Dibayar		122.000

Diketahui Oleh:
Kepala Subbagian Umum



Ditandatangani secara Elektronik
Muhammad Iqbal
NIP 198304272006021002

Disetujui Oleh:
Kuasa Pengguna Anggaran



Ditandatangani secara Elektronik
Melly Maiesta
NIP 197605311999032001

Direkam Oleh:
Operator



Ditandatangani secara Elektronik
Adelia T.R. Hutapea
NIP 199908242022012001



FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : KEMENTERIAN KEUANGAN
 Negara/Lembaga : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
 Eselon I : KANWIL DJKN SUMATERA UTARA
 Wilayah : KPKNL KISARAN
 Satuan Kerja : PJ-01/KNL.0203/2025
 No Dokumen : 31 Desember 2025
 Tanggal : 2025
 Tahun Anggaran : Jurnal Penyesuaian Pendapatan Diterima Di Muka 31 Desember 2025
 Keterangan :

Kategori Jurnal Penyesuaian

V	Pendapatan Diterima di Muka		Koreksi Antar Beban
	Pendapatan Yang Masih Harus diterima		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
	Belanja Dibayar di Muka		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
	Belanja yang Masih Harus Dibayar		Pembentukan Piutang Jangka Panjang
	Penyisihan Piutang		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
	Penghapusan Piutang		Transfer Masuk
	Penyusutan Aset		Transfer Keluar
	Kas di Bendahara Penerimaan		Reklasifikasi Neraca
	Kas di Bendahara Pengeluaran		Koreksi
	Persediaan		Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	551.875	
	K	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka		551.875

Diketahui Oleh:
Kepala Subbagian Umum



Ditandatangani secara Elektronik
Muhammad Iqbal
NIP 198304272006021002

Disetujui Oleh:
Kuasa Pengguna Anggaran



Ditandatangani secara Elektronik
Melly Maiesta
NIP 197605311999032001

Direkam Oleh:
Operator



Ditandatangani secara Elektronik
Adelia T.R. Hutapea
NIP 199908242022012001



FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : KEMENTERIAN KEUANGAN
 Negara/Lembaga : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
 Eselon I : KANWIL DJKN SUMATERA UTARA
 Wilayah : KPKNL KISARAN
 Satuan Kerja : PJ-01/KNL.0203/2024
 No Dokumen : 31 Desember 2025
 Tanggal : 2025
 Tahun Anggaran : Jurnal Penyesuaian Pendapatan Diterima Di Muka 31 Desember 2025
 Keterangan :

Kategori Jurnal Penyesuaian

V	Pendapatan Diterima di Muka		Koreksi Antar Beban
	Pendapatan Yang Masih Harus diterima		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
	Belanja Dibayar di Muka		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
	Belanja yang Masih Harus Dibayar		Pembentukan Piutang Jangka Panjang
	Penyisihan Piutang		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
	Penghapusan Piutang		Transfer Masuk
	Penyusutan Aset		Transfer Keluar
	Kas di Bendahara Penerimaan		Reklasifikasi Neraca
	Kas di Bendahara Pengeluaran		Koreksi
	Persediaan		Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	5.387.500	
	K	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka		5.387.500

Diketahui Oleh:
Kepala Subbagian Umum



Ditandatangani secara Elektronik
Muhammad Iqbal
NIP 198304272006021002

Disetujui Oleh:
Kuasa Pengguna Anggaran



Ditandatangani secara Elektronik
Melly Maesta
NIP 197605311999032001

Direkam Oleh:
Operator



Ditandatangani secara Elektronik
Adelia T.R. Hutapea
NIP 199908242022012001



FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian : KEMENTERIAN KEUANGAN
 Negara/Lembaga : DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
 Eselon I : KANWIL DJKN SUMATERA UTARA
 Wilayah : KPKNL KISARAN
 Satuan Kerja : PJ-02/KNL.0203/2023
 No Dokumen : 31 Desember 2025
 Tanggal : 2025
 Tahun Anggaran : Jurnal Penyesuaian Pendapatan Diterima Di Muka 31 Desember 2025
 Keterangan :

Kategori Jurnal Penyesuaian

V	Pendapatan Diterima di Muka		Koreksi Antar Beban
	Pendapatan Yang Masih Harus diterima		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi
	Belanja Dibayar di Muka		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi
	Belanja yang Masih Harus Dibayar		Pembentukan Piutang Jangka Panjang
	Penyisihan Piutang		Pembentukan Piutang Jangka Pendek
	Penghapusan Piutang		Transfer Masuk
	Penyusutan Aset		Transfer Keluar
	Kas di Bendahara Penerimaan		Reklasifikasi Neraca
	Kas di Bendahara Pengeluaran		Koreksi
	Persediaan		Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1.466.667	
	K	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka		1.466.667

Diketahui Oleh:
Kepala Subbagian Umum



Ditandatangani secara Elektronik
Muhammad Iqbal
NIP 198304272006021002

Disetujui Oleh:
Kuasa Pengguna Anggaran



Ditandatangani secara Elektronik
Melly Maiesta
NIP 197605311999032001

Direkam Oleh:
Operator



Ditandatangani secara Elektronik
Adelia T.R. Hutapea
NIP 199908242022012001



R. Informasi Kinerja Satuan Kerja

LAPORAN REALISASI KINERJA

Tahun Anggaran 2025

Periode s.d bulan : 2025-13

Kementerian Negara/Lembaga : 015 - KEMENTERIAN KEUANGAN

Eselon 1 : 015.09 - DITJEN KEKAYAAN NEGARA

Wilayah/Provinsi : 07.10 - KAB. ASAHAN/SUMATERA UTARA

Satuan Kerja : 506081 - KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KISARAN

Halaman : 1

Tanggal Cetak : 19-02-2026

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP	Referensi	Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian			
01	PELAYANAN UMUM	2,090,491,000.00	1,655,388,957.00	79.19%							
01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI	2,090,491,000.00	1,655,388,957.00	79.19%							
CD	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	245,908,000.00	182,909,875.00	74.38%							
4796	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	22,562,000.00	975,000.00	4.32%							
AEF	Sosialisasi dan Diseminasi	22,562,000.00	975,000.00	4.32%							
001	Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Negara	10,227,000.00	975,000.00	9.53%	10.0000	Orang	10.0000	100%	90.47%		
002	Sosialisasi Pengelolaan Piutang Negara	9,688,000.00	0.00	0%	10.0000	Orang	10.0000	100%	100%		
003	Sosialisasi/Edukasi di Bidang Lelang	2,647,000.00	0.00	0%	5.0000	Orang	5.0000	100%	100%		
4798	Pengelolaan Aset	223,346,000.00	181,934,875.00	81.46%							
AAH	Peraturan lainnya	87,230,000.00	77,618,515.00	88.98%							
001	Keputusan Permohonan Pengelolaan Kekayaan Negara	53,354,000.00	44,434,500.00	83.28%	65.0000	Surat Keputusan	65.0000	100%	16.72%		

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP	Referensi	Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian			
002	Keputusan Hasil Pengurusan/Pengelolaan Piutang Negara	33,876,000.00	33,184,015.00	97.96%	13.0000	Surat Keputusan	13.0000	100%	2.04%		
ABA	Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan	13,240,000.00	12,599,000.00	95.16%							
002	Rekomendasi Hasil Kajian Portofolio Aset	13,240,000.00	12,599,000.00	95.16%	138.0000	Rekomendasi Kebijakan	138.0000	100%	4.84%		
BAH	Pelayanan Publik Lainnya	23,656,000.00	23,047,960.00	97.43%							
001	Risalah Lelang	23,656,000.00	23,047,960.00	97.43%	350.0000	Dokumen	350.0000	100%	2.57%		
FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	80,138,000.00	52,448,900.00	65.45%							
004	Rekomendasi di Bidang Kekayaan Negara	24,040,000.00	23,806,000.00	99.03%	2.0000	Rekomendasi	2.0000	100%	0.97%		
005	Rekomendasi Hasil Penilaian	16,800,000.00	12,591,900.00	74.95%	2.0000	Rekomendasi	2.0000	100%	25.05%		
007	Penggalian Potensi Lelang	39,298,000.00	16,051,000.00	40.84%	2.0000	Rekomendasi	2.0000	100%	59.16%		
FAK	Pengelolaan Aset BUN	8,828,000.00	7,200,000.00	81.56%							
001	Aset BUN yang Dikelola	8,828,000.00	7,200,000.00	81.56%	2.0000	Aset	2.0000	100%	18.44%		
UAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	10,254,000.00	9,020,500.00	87.97%							
201	Rekomendasi BMN Berupa Tanah yang Disertipikatkan (PN)	10,254,000.00	9,020,500.00	87.97%	470.0000	Rekomendasi	470.0000	100%	12.03%		
WA	Program Dukungan Manajemen	1,844,583,000.00	1,472,479,082.00	79.83%							
4700	Legislasi dan Litigasi	22,088,000.00	19,746,000.00	89.4%							
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	22,088,000.00	19,746,000.00	89.4%							

Kode	Uraian	BELANJA			KELUARAN				GAP	Referensi	Keterangan
		Pagu	Realisasi	Persentase	Target	Satuan	Realisasi Volume RO	Progress Capaian			
969	Layanan Bantuan Hukum	22,088,000.00	19,746,000.00	89.4%	20.0000	Layanan	20.0000	100%	10.6%		
4701	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	1,764,259,000.00	1,429,188,482.00	81.01%							
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1,684,259,000.00	1,361,584,732.00	80.84%							
002	Kerumahtanggaan	102,443,000.00	81,033,753.00	79.1%	12.0000	Layanan	12.0000	100%	20.9%		
994	Layanan Perkantoran	1,581,816,000.00	1,280,550,979.00	80.95%	12.0000	Layanan	12.0000	100%	19.05%		
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	80,000,000.00	67,603,750.00	84.5%							
001	Peralatan Fasilitas Perkantoran	24,000,000.00	23,603,750.00	98.35%	4.0000	Unit	4.0000	100%	1.65%		
003	Kendaraan Bermotor	56,000,000.00	44,000,000.00	78.57%	2.0000	Unit	2.0000	100%	21.43%		
4702	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	29,228,000.00	12,277,600.00	42.01%							
BMB	Komunikasi Publik	29,228,000.00	12,277,600.00	42.01%							
001	Pembinaan/Edukasi Publik	14,360,000.00	5,081,600.00	35.39%	30.0000	Orang	30.0000	100%	64.61%		
002	Kehumasan	9,868,000.00	4,841,000.00	49.06%	5.0000	Kegiatan	5.0000	100%	50.94%		
003	Pameran/Eksibisi	5,000,000.00	2,355,000.00	47.1%	1.0000	Kegiatan	1.0000	100%	52.9%		
4704	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	29,008,000.00	11,267,000.00	38.84%							
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	29,008,000.00	11,267,000.00	38.84%							
001	Rekomendasi Kepatuhan Internal	29,008,000.00	11,267,000.00	38.84%	5.0000	Dokumen	5.0000	100%	61.16%		